



**EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA DALAM PENYELESAIAN  
KREDIT MACET DI PERUSAHAAN PEMBIAYAAN  
KENDARAAN SEPEDA MOTOR PT. ADIRA FINANCE  
KOTA MAKASSAR**

**TESIS**

Disusun  
Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Derajat S2  
Program Studi Magister Kenotariatan

**Oleh :**

**RM. LEONARDO CHARLES WAHYU WIBOWO  
B4B 008 230**

**PEMBIMBING :**

**H. KASHADI, S.H., M.H**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN  
PROGRAM PASCA SARJANA  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG  
2010**

**EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA DALAM PENYELESAIAN  
KREDIT MACET DI PERUSAHAAN PEMBIAYAAN  
KENDARAAN SEPEDA MOTOR PT. ADIRA FINANCE  
KOTA MAKASSAR**

Disusun Oleh :

**RM. LEONARDO CHARLES WAHYU WIBOWO  
B4B 008 230**

Disusun  
Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Derajat S2  
Program Studi Magister Kenotariatan

**PEMBIMBING,**

**H. KASHADI, S.H., M.H  
NIP. 19540624 198203 1 001**

**EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA DALAM PENYELESAIAN  
KREDIT MACET DI PERUSAHAAN PEMBIAYAAN  
KENDARAAN SEPEDA MOTOR PT. ADIRA FINANCE  
KOTA MAKASSAR**

Disusun Oleh :

**RM. LEONARDO CHARLES WAHYU WIBOWO  
B4B 008 230**

Dipertahankan Di Depan Dewan Penguji  
Pada Tanggal 29 Maret 2010

Tesis Ini Telah Diterima  
Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar  
Magister Kenotariatan

Pembimbing,

Mengetahui,  
Ketua Program Studi  
Magister Kenotariatan  
Universitas Diponegoro

**H. KASHADI, S.H., M.H**  
**NIP. 19540624 198203 1 001**

**H. KASHADI, S.H., M.H**  
**NIP. 19540624 198203 1 001**

## **PERNYATAAN**

Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di salah satu perguruan tinggi, sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang, Maret 2010

Yang Menyatakan,

R.M. LC. Wahyu Wibowo, SH.

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis persembahkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah menganugerahkan berkat, kesehatan dan kekuatan sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul; **“EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA DALAM PENYELESAIAN KREDIT MACET DI PERUSAHAAN PEMBIAYAAN KENDARAAN SEPEDA MOTOR PT. ADIRA FINANCE KOTA MAKASSAR”**.

Tesis ini disusun guna memenuhi sebagian persyaratan dalam mencapai derajat Sarjana S-2, pada Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang . Penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan-kekurangan dalam tesis ini, baik dalam substansi maupun sistematika penyajiannya. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun guna kesempurnaannya lebih lanjut.

Dalam proses perkuliahan hingga pada penyusunan tesis ini, penulis telah banyak menerima dukungan moril maupun materiil dari berbagai pihak, untuk itu melalui kesempatan ini perkenankanlah penulis mengucapkan rasa terima kasih dan penghargaan yang tidak terhingga kepada semua pihak yang telah mendukung penulis dalam studi selama ini. Teristimewa, ucapan terima kasih dan penghargaan ini penulis sampaikan secara khusus kepada, yang terhormat :

1. Bapak Prof. DR. Dr. Susilo Wibowo, MS.Med, Sp.And, selaku Rektor Universitas Diponegoro Semarang;
2. Bapak Prof. Y. Warella, MPA., P.Hd., selaku Direktur Program Pasca sarjana Universitas Diponegoro Semarang;
3. Bapak Prof. DR. Arief Hidayat, SH., MS, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang;
4. Bapak H. Kashadi, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang, sekaligus sebagai Dosen Pembimbing tesis ini, yang setiap saat bersedia memberikan waktunya dalam membimbing, mendorong dan memberikan banyak pencerahan kepada penulis selama ini;
5. Bapak DR. Budi Santoso, SH., MS., selaku Sekretaris I pada Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang;
6. Bapak DR. Suteki, SH., MH., selaku Sekretaris II pada Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang;
7. Hj. Sri Weletno, SH., MS., selaku Dosen Wali Penulis;
8. Segenap Guru Besar dan Staf Pengajar Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro yang secara professional memberikan ilmu selama penulis mengikuti perkuliahan.
9. Segenap Karyawan Bagian Tata Usaha Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang;

10. Bapak Raymond Felix, Branch Manager Sales PT. Adira Fianance Cabang Kota Makassar;
11. Gunawan sabara, SH, Litigation Dept. Head PT. Adira Finance cabang Kota Makassar;
12. Faiz Wardhin, SH, Remedial Admin PT. Adira Finance cabang Kota Makassar;
13. Para Karyawan dan Karyawati PT. Adira Finance cabang Kota Makassar yang tidak dapat disebut satu persatu, yang telah banyak memberikan Informasi dan data-data bagi penulis dalam rangka melakukan penulisan tesis.
14. Drs. Sjamsul Bachri SH., Kepala Kanwil Departemen Hukum dan HAM Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan.
15. Abdul Rahman SH., MH., Kasubbid Pendaftaran Fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia, Kanwil Departemen Hukum dan HAM Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan;
16. Para Responen yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah banyak membantu penulis di dalam melakukan penelitian;
17. Rekan-Rekan di Notariat : Defto Yusaztra SH., Urai Imamuddin SH., Lalu Daud SH., Sukarno SH., Ariawan Sukarno SH., Sugiarto Litut SH, Firman Gusri SH., Dedi Supriatno SH., Deni Kristian SH., Muh. Gazali Rais SH. Rizko Elwindo Al Jufri SH., Annisa Rezki Sakih SH., Diah Ayuningtyas Putri sari Dewi SH., Wiwin Puspita Sari SH.,

Liza Rohana Yulida SH., dan anak ex Kontrakan Pleburan, yang selalu bersama dalam keseharian dan menjadi mitra diskusi dalam mengikuti kuliah di Program Magister Kenotariatan Universitas diponegoro.

18. Sahabat-Sahabat yang di Makassar yang telah banyak membantu penulis dalam melakukan penelitian hingga sampai selesai dan tiada henti-henti memberikan dorongan semangat dan doa yang tiada putus selalu menyertai, menemani, dalam suka dan duka.

Tidak akan pernah terlupakan kepada orang-orang terdekat penulis, Ayahanda RM. St. Eko Rahardjo GP, Ibunda RA. Sri Gutami Ph, GP, kakanda RM. Erdianto Agung Budi Gunawan, SE., RM. Tri Agus Prasetyo Rahadjo Putro Spt, terima kasih atas cinta, kasih sayang, dan pengorbanan yang diberikan kepada penulis selama ini. dan tak lupa aku panjatkan kepada, Ir. RM. Sri Sapto Edhi, MTP., yang telah banyak membantu baik moril maupun materil dan mendorong penulis untuk melanjutkan kuliah sampai jenjang yang lebih tinggi, dengan uraian air mata dan jiwanya telah membakar semangat penulis menyelesaikan studi. Untuk itu, tesis ini penulis persembahkan kepada Seluruh keluarga besarku, dan tak lupa buat Novita Sari SE,. MM,. terima kasih atas pengorbanan, dukungan dan doanya selama ini

Dengan kerendahan hati, penulis berharap kiranya tesis ini dapat menjadi masukan yang bermanfaat bagi PT. Adira finance dan atau



kepada siapa saja yang membutuhkan informasi sehubungan dengan materi tesis ini. namun disadari masih ada kekurangan dan belum sempurna sunstansinya. Oleh karena itu, saran dan kritik yang konstruktif sangat diharapkan untuk perbaikannya.

Akhirnya, satu babak dalam perjalanan hidup ini tercapai sudah, telah terbuka titik awal jalan baru untuk ditempuh dalam asa perjalanan hidup ini. Semoga harapan dan cinta yang selalu menyemangati penulis selama ini bisa terealisasi hanya dalam Pimpinan dan Anugerah dari Allah SWT amien.

Semarang 10 Pebruari 2010

Penulis,

RM. LC. Wahyu Wibowo

## ABSTRACT

Multifinance development in Indonesia can not be denied, it's going better. One indicator is the growing proliferation of consumer finance (consumer finance) in Indonesia in the last few years. Growth in consumer financing can be seen increasing numbers of motor vehicles in Indonesia. With all the convenience provided multifinance, no wonder the credit growth of motor vehicles increased significantly.

Dominance of one factor in the execution of fiduciary assurance multifinance is the possibility of bad debts, two-wheeled vehicles. Though generally performing loans in financial institutions is relatively small compared with the same problems in banking institutions, is still a problem like this is almost certainly experienced by each consumer financing institution.

The problems discussed in this research is about how the execution in the settlement of fiduciary insurance bad credit car financing company PT. Adira Finance in Makassar and settlement patterns of this juridical approach using empirical methods that focus on the legal rules relating to the issues studied, and the fact that there is, with the qualitative data analysis to test data with theoretical concepts, opinions of experts, legislation, and field studies, so the results of theoretical analysis developed in the form of a thesis.

Execution object fiduciary assurance in PT. Adira Finance Makassar committed against customers who do defaults by taking back the goods from the hands of security in the hands of customers or third-party recipient facility, which is the last effort of PT. Adira Finance of Makassar to rescue assets in an effort to minimize losses, if the customer no longer able to make installment payments by selling insurance products, the results from these sales to pay off the remaining debt facility receiver.

Related to the object execution fiduciary assurance encountered several obstacles guarantee it is not registered or made under the hand, in the event of defaults by the recipient facility, the facility is giving ordinary creditors who do not have rights preferent, against the execution creditor fiduciary for the benefit of a guarantee, the debt can not be implemented.

Keywords: *Execution, Guarantee, fiduciary*

## ABSTRAK

Perkembangan *multifinance* di Indonesia tidak dapat dipungkiri semakin baik. Salah satu indikatornya adalah tumbuh suburnya *consumer finance* (pembiayaan konsumen) di Indonesia dalam berapa tahun terakhir. Pertumbuhan pembiayaan konsumen ini dapat dilihat semakin meningkatnya jumlah kendaraan bermotor di Indonesia. Dengan segala kemudahan yang diberikan pihak *multifinance*, tidak heran pertumbuhan kredit kendaraan bermotor meningkat secara signifikan.

Salah satu faktor dominasi eksekusi Jaminan Fidusia di *multifinance* adalah kemungkinan adanya kredit bermasalah kendaraan roda dua. Meski secara umum kredit bermasalah di lembaga pembiayaan relatif kecil dibandingkan dengan permasalahan yang sama di lembaga perbankan, tetap saja masalah seperti ini hampir pasti dialami oleh setiap lembaga pembiayaan konsumen.

Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah mengenai bagaimana pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia dalam penyelesaian kredit macet di perusahaan pembiayaan kendaraan sepeda motor PT. Adira Finance di Kota Makassar serta pola penyelesaian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris yang menekankan pada aturan hukum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, dan melihat kenyataan yang ada, dengan analisa data kualitatif yaitu menguji data dengan konsep teori, pendapat para ahli, peraturan perundangan, dan studi lapangan, sehingga hasil analisa disusun secara teoritis dalam bentuk tesis.

Eksekusi obyek jaminan Fidusia di PT. Adira Finance kota Makassar dilakukan terhadap customer yang melakukan wanprestasi dengan pengambilan kembali barang jaminan dari tangan customer maupun di tangan pihak ketiga penerima fasilitas, yang merupakan upaya terakhir PT. Adira Finance Kota Makassar untuk penyelamatan asset dalam upaya meminimalisasi kerugian, apabila customer tidak sanggup lagi melakukan pembayaran angsuran dengan melakukan penjualan barang jaminan, hasil dari penjualan tersebut untuk melunasi sisa hutang penerima fasilitas.

Sehungan dengan pelaksanaan eksekusi obyek jaminan fidusia ditemui beberapa hambatan benda jaminannya tidak didaftarkan atau dibuat dibawah tangan, apabila terjadi wanprestasi oleh penerima fasilitas, maka pemberi fasilitasnya merupakan kreditor biasa yang tidak memiliki hak preferent, terhadap kreditor tersebut eksekusi jaminan fidusia untuk kepentingan piutangnya tidak dapat dilaksanakan.

*Kata kunci: Eksekusi, Jaminan Fidusia.*

## DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN PENGUJIAN

SURAT PERNYATAAN

KATA PENGANTAR ..... v

ABSTRAK ..... x

ABSTRACT ..... xi

DAFTAR ISI ..... xii

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang ..... 1

B. Perumusan Masalah ..... 8

C. Tujuan Penelitian ..... 8

D. Manfaat Penelitian ..... 9

1. Manfaat Akademis ..... 9

2. Manfaat Praktis ..... 9

E. Kerangka Pemikiran ..... 9

F. Metode Penelitian ..... 22

1. Pendekatan Masalah ..... 23

2.	Spesifikasi Penelitian .....	24
3.	Obyek Dan Subyek Penelitian .....	25
4.	Teknik Pengumpulan Data .....	25
5.	Teknik Analisis Data .....	29
6.	Sistematika Penulisan .....	30
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA		
A.	Tinjauan Umum Tentang Jaminan Fidusia .....	32
1.	Sejarah dan Pengertian Jaminan Fidusia Fidusia .....	32
2.	Ciri-Ciri Lembaga Fidusia .....	35
3.	Obyek dan Subyek Jaminan Fidusia .....	38
4.	Proses Terjadinya Jaminan Fidusia .....	39
5.	Hapusnya Jaminan Fidusia .....	45
6.	Eksekusi Jaminan Fidusia .....	47
B	Tinjauan Umum Tentang Kredit dan Perjanjian Kredit.....	48
1.	Pengertian Kredit .....	48
2.	Perjanjian Kredit.....	56
3.	Penanganan Kredit Bemasalah.....	62
C.	Tinjauan Umum Tentang Pembiayaan Konsumen	67
1.	Pengertian Pembiayaan Konsumen .....	67
2.	Pentingnya Jaminan Dalam Pembiayaan Konsumen .....	68

	3. Hubungan Para Pihak Dalam pembiayaan Konsumen .....	70
	D. Tinjauan Umum Tentang Eksekusi.....	75
	1. Pengertian Eksekusi.....	75
	2. Jenis-jenis Eksekusi .....	79
BAB III	: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	84
	A. Eksekusi Obyek Jaminan Fidusia yang Dilakukan Oleh PT. Adira Finance Kota Makassar .....	84
	B. Hambatan-Hambatan Apa Saja Dalam Eksekusi Obyek Jaminan Pada PT. Adira Finance di Kota Makassar Dan Upaya –upaya Apa Untuk Menyelesaikannya.....	105
BAB IV	: PENUTUP.....	119
	A. Kesimpulan .....	119
	B. Saran .....	120

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pembangunan ekonomi sebagai bagian dari pembangunan Nasional merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, Dalam rangka dan meneruskan pembangunan baik pemerintah maupun masyarakat, baik perseorangan maupun badan hukum memerlukan dana besar. Seiring dengan meningkatnya pembangunan, meningkat pula kebutuhan terhadap pendanaan, yang sebahagian besar dana yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tersebut melalui pinjam-meminjam.<sup>1</sup>

Di dalam masa pembangunan ini kehidupan masyarakat tidak terlepas dari berbagai kebutuhan, karena pada umumnya dalam masyarakat seorang tidak mampu memenuhi segala kebutuhannya sendiri, ia memerlukan tangan ataupun bantuan dari pihak lain. Maka dalam keadaan demikian tidak jarang melakukan utang piutang sekedar untuk tambahan dana dalam mencukupi hidupnya.

Utang piutang merupakan suatu perbuatan yang tidak asing lagi bagi masyarakat kita pada masa sekarang ini. Utang piutang tidak hanya

---

<sup>1</sup>Purwahid Patrik dan Kashadi, *Hukum Jaminan*, (Semarang: Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, 2008), hal 32.

dilakukan oleh orang-orang yang ekonominya lemah, tetapi juga dilakukan oleh orang-orang yang ekonominya relatif mampu.

Suatu utang diberikan terutama atas integritas atau kepribadian debitor, kepribadian yang menimbulkan rasa kepercayaan dalam diri kreditor, bahwa debitor akan memenuhi kewajiban pelunasannya dengan baik. Akan tetapi juga suatu ketika nampaknya keadaan keuangan seseorang baik, belum menjadi jaminan bahwa nanti pada saat jatuh tempo untuk mengembalikan pinjaman, keadaan keuangannya masih tetap sebaik keadaan semula.<sup>2</sup>

Bagi pihak yang meminjamkan uang (kreditor) dalam melepaskan uangnya itu hanya sekedar diikuti oleh rasa percaya saja, tetapi juga disertai, dengan adanya jaminan. Oleh sebab itu dalam perbuatan pinjam meminjam uang tersebut jika hanya didasarkan pada rasa percaya saja, maka tentunya akan timbul kerugian, khususnya bagi pihak kreditor sebagai pihak yang memberikan/melepaskan barangnya, apa bila debitor tersebut cidera janji.

Selanjutnya untuk menampung kebutuhan masyarakat, perkembangan ekonomi, dan perkembangan perkreditan dalam masyarakat Indonesia sekarang ini memerlukan bentuk-bentuk jaminan pembiayaan, di mana orang memerlukan kredit dengan jaminan barang

---

<sup>2</sup> J. Satrio, *Hukum Jaminan, Hak-hak Kebendaan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991), hal 97.



bergerak, namun tersebut masih tetap dapat menggunakannya untuk keperluan sehari-hari maupun untuk keperluan usahanya, jaminan kredit yang demikian tidak dapat ditampung hanya oleh peraturan-peraturan gadai, yang tidak memungkinkan benda jaminan tersebut tetap berada pada yang menggadaikan, mengingat ketentuan dalam pasal 1152 ayat (2) KUH Perdata, yang mensyaratkan bahwa benda-benda bergerak berwujud yang diberikan sebagai jaminan berupa gadai harus berpindah dan berada dalam kekuasaan yang berpiutang, sedang barang-barang tersebut sangat diperlukan oleh yang bersangkutan menjalankan usahanya. Dilain pihak yang berpiutang mungkin tidak bersedia menerima jaminan berupa gadai, jika barang tersebut terdiri dari kendaraan bermotor, oleh karenanya yang berpiutang harus memikul beban untuk menyediakan tempat penyimpanan dari barang-barang tersebut. Apabila yang berpiutang meminta jaminan berupa hak tanggungan atau hipotik, mungkin hal ini tidak dapat dipenuhi oleh yang berpiutang, sebab tidak mempunyai tanah. Pasal 1338 KUH Perdata sebagai dasar hukum adanya “kebebasan berkontrak” membuka kemungkinan untuk itu, dengan batas waktu perjanjian tersebut tidak bertentangan undang-undang, ketertiban umum, kesusilaan. Atas dasar itu maka suatu perjanjian yang berlandaskan penyerahan milik atas suatu benda sebagai jaminan, merupakan suatu perjanjian untuk memberikan jaminan. Yang berpiutang (kreditor) menjadi pemilik dari benda itu sebagai demikian pada

hakikatnya mempunyai kedudukan yang lebih kuat dari seorang pemegang gadai. Apabila yang berutang melunasi utangnya itu, maka milik benda itu masih beralih kembali kepada pemilik benda yang berutang dan yang berpiutang untuk mengembalikan benda itu kepada yang berutang. Oleh karena itu guna memenuhi kebutuhan tersebut dan untuk memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan, maka disyahrkannya Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan Fidusia yang diundangkan pada tanggal 30 september 1999 dan diumumkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor.168 yang dirumuskan sebagai penyerahan hak milik atas dasar kepercayaan.

Sehubungan dengan penjaminan ini, apa yang harus dilakukan oleh penerima fidusia (kreditor) apabila pemberi fidusia (debitor) melalaikan kewajibannya atau cidera janji yang berupa lalainya pemberi fidusia (debitor) memenuhi kewajibannya pada saat pelunasan utangnya sudah matang untuk ditagih, maka dalam peristiwa seperti itu, penerima fidusia (kreditor) bisa melaksanakan eksekusinya atas benda jaminan fidusia.<sup>3</sup>

Secara umum eksekusi merupakan pelaksanaan atau keputusan pengadilan atau akta, maka pengambilan pelunasan kewajiban kreditor melalui hasil penjualan benda-benda tertentu milik debitor.

---

<sup>3</sup> *Ibid*, hal 319.

Perlu disepakati terlebih dahulu bahwa yang dinamakan eksekusi adalah pelaksanaan keputusan pengadilan atau akta. Tujuan dari pada eksekusi adalah pengambilan pelunasan kewajiban debitor melalui hasil penjualan benda-benda tertentu milik debitor atau pihak ketiga pemberi jaminan.<sup>4</sup>

Salah satu ciri dari jaminan utang kebendaan yang baik adalah apabila dapat eksekusinya secara cepat dengan proses sederhana, efisien dan mengandung kepastian hukum. Misalnya ketentuan eksekusi fidusia di Amerika Serikat yang membolehkan pihak kreditur mengambil sendiri objek jaminan fidusia asal dapat dihindari perkelahian/percekcokan (*breaking the peace*). Barang tersebut boleh dijual dimuka umum atau dibawah tangan asalkan dilakukan dengan itikad baik.<sup>5</sup>

Tentu saja fidusia sebagai salah satu jenis jaminan utang juga harus memiliki unsur-unsur cepat, murah, dan pasti tersebut. Sebab selama ini (sebelum keluarnya Undang-undang Fidusia Nomor 42 Tahun 1999) tidak ada kejelasan bagaimana caranya mengeksekusi fidusia, sehingga tidak ada ketentuan yang mengaturnya, banyak yang menafsirkannya bahwa eksekusi fidusia adalah memakai prosedur

---

<sup>4</sup> *Ibid*, hal 320.

<sup>5</sup> Munir Fuady, *Jaminan Fidusia* (Bandung: PT. Citra aditya, 2000) hal 57.

gugatan biasa(lewat pengadilan dengan prosedur biasa) yang panjang, mahal dan melelahkan itu.<sup>6</sup>

Sebagaimana yang telah dibahas sebelumnya, dalam hal debitor (pemberi fidusia) cidera janji, maka kreditor (penerima fidusia) ini dapat dilangsungkan melaksanakan eksekusi. Ketentuan ini didasarkan pada Pasal 29 ayat 1(a) Undang-Undang Jaminan Fidusia yang merupakan pengaturan lebih lanjut dari Pasal 15 Undang-Undang Jaminan Fidusia yaitu berdasarkan pada title eksekutorial dalam Sertifikat fidusia yang dicantumkan kata-kata Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Irah-irah Inilah Yang memberikan titel eksekutorial yang mensejajarkan kekuatan akta tersebut dengan putusan pengadilan. Eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia dapat dilakukan dengan cara:

- a. Pelaksanaan title eksekutorial
- b. Penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia itu sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutang dari hasil penjualan.
- c. Penjualan dibawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tinggi yang menguntungkan para pihak.

---

<sup>6</sup> *Ibid*, hal 57.

Jadi prinsipnya adalah bahwa penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia dapat dilakukan melalui lelang suatu lelang dimuka umum dan dimungkinkan juga dilakukan penjualan dibawah tangan, asalkan hal tersebut disepakati oleh pemberi dan penerima fidusia.<sup>7</sup>

Dengan demikian lembaga jaminan perlu mendapat perhatian serius sehubungan dengan pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia dalam praktek kehidupan masyarakat dalam rangka pembangunan Indonesia khususnya dibidang hukum, karena perkembangan ekonomi dan khususnya dibidang hukum, karena perkembangan ekonomi dan perdangan akan selalu diikuti oleh perkembangan kebutuhan akan kredit.

Berdasarkan hasil prapenelitian penulis, eksekusi jaminan fidusia pada PT. Adira Finance Kota Makassar sering terjadi kesulitan dalam hal barang jaminan berupa kendaraan bermotor roda dua sudah dipindahtangankan, identitas barang jaminan diubah, debitor pindah alamat dan bahkan ada perlawanan dari debitor maupun sekelompok orang yang tidak menerima kenyataan bahwa barang jaminan tersebut akan diambil kembali oleh kreditor guna penyelesaian utang-utang debitor, sehingga menarik untuk dikaji dan diteliti lebih lanjut dalam bentuk tesis dengan judul: "EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA DALAM PENYELESAIAN KREDIT MACET DI PERUSAHAAN PEMBIAYAAN

---

<sup>7</sup> Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2000), hal 52.

KENDARAAN SEPEDA MOTOR PT. ADIRA FINANCE DI KOTA MAKASSAR”.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan apa yang telah diuraikan diatas, maka beberapa pokok permasalahan yang akan di teliti antara lain :

1. Bagaimana eksekusi obyek jaminan fidusia yang dilakukan oleh PT. Adira Finance di Kota Makassar?
2. Hambatan-hambatan apa saja dalam eksekusi obyek jaminan fidusia pada PT. Adira Finance di Kota Makassar dan upaya-upaya apa untuk menyelesaikannya?

## **C. Tujuan Penelitian**

Bertitik tolak pada permasalahan yang telah diuraikan dimuka, maka penetian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui bagaimana eksekusi objek jaminan Fidusia yang dilakukan oleh PT. Adira Finance di Kota Makassar.
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan dalam eksekusi obyek jaminan pada PT. Adira Finance di Kota Makassar dan upaya-upaya apa untuk penyelesaiannya.

## **D. Manfaat Penelitian**

Dengan tercapainya tujuan Penelitian Sebagaimana tersebut diatas, maka hasil penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat ganda, baik manfaat praktis maupun manfaat teoritis sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum khususnya hukum bisnis yang berkaitan dengan pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia dalam rangka penyelesaian kredit macet sesuai dengan Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999.

2. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu mendukung pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia sesuai dengan Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 sebagai upaya penyelesaian kredit macet.

## **E. Kerangka Pemikiran**

Dalam menjawab permasalahan tersebut dalam kerangka konseptual dibutuhkan pendekatan secara teoritik yaitu melalui pendekatan kepustakaan yang berupa pendapat para pakar dibidang Hukum Perikatan (Perjanjian) sebagai acuan. Adapun yang ditekankan dalam kerangka pemikiran ini adalah :

1. Tinjauan Umum tentang perjanjian

Ketentuan mengenai perjanjian diatur dalam buku III KUHPerdara Pasal 1313 KUHPerdara, Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

Mariam Darus Badruzaman terhadap rumusan tersebut berpendapat bahwa definisi perjanjian tersebut sudah otentik rumusannya disatu sisi adalah tidak lengkap karena hanya menekankan pada perjanjian sepihak saja dan disisi lain terlalu luas karena dapat mengenai hal-hal yang berhubungan dengan janji kawin yaitu sebagai perbuatan yang terdapat dalam bidang hukum keluarga.<sup>8</sup>

Akibat tidak lengkap dan terlalu luasnya rumusan perjanjian yang memberikan oleh pembentuk undang-undang tersebut akibatnya muncullah berbagai pandangan mengenai definisi yang di berikan oleh para penulis hukum. Diantaranya adalah :

Pengertian perjanjian menurut Subekti, suatu perjanjian adalah suatu peristiwa, dimana seseorang berjanji kepada seseorang lain, atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.<sup>9</sup>

Pengertian perjanjian menurut Sudikno Mertokusumo adalah : hubungan hukum antara kedua orang yang bersepakat untuk

---

<sup>8</sup> Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, (Bandung: penerbit Alumni, 1994), hal 18.

<sup>9</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: PT. Intermasa, 1996), hal 1.



menimbulkan akibat hukum.dua pihak sepakat untuk menentukan peraturan atau kaedah atau hak-hak dan kewajiban yang mengikat mereka untuk di taati atau di jalankan.<sup>10</sup>

Disamping kedua definisi diatas yang menekankan perjanjian sebagai melahirkan kewajiban bertimbal balik, Munir Fuady memberikan definisi lebih luas bahwa kontrak adalah : suatu kesepakatan yang di perjanjikan diantara dua orang atau lebih yang dapat menimbulkan, memodifikasi atau menghilangkan hubungan hukum.<sup>11</sup>

## **2. Kredit**

### **a. Pengertian Kredit**

Proses pemberian kredit akan menyangkut suatu jumlah uang dari nilai yang relatif kecil sampai jumlah yang cukup besar, sehingga ada berbagai kemungkinan pula yang dapat terjadi yang akan membawa kerugian financial bagi pemberi kredit apabila kredit-kredit tersebut tidak dikelola dengan baik.

Kata “kredit” berasal dari bahasa latin “*creditus*” yang merupakan bentuk past participle dari kata “*credee*” yang berarti *to trust*. Kata tersebut sendiri berarti kepercayaan.<sup>12</sup> Dengan kata lain kepercayaan akan

---

<sup>10</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenai Hukum (Suatu Pengantar)*, Edisi 4 cetakan 2, Yogyakarta : Liberty, 1999), hal 23.

<sup>11</sup> Munir Fuady, *Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktek*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1999), hal.4.

<sup>12</sup> Munir Fuady, *Hukum Perkreditan Komporer*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996), hal 5.

kebenaran. Bahasa belanda menyebut kredit dengan *Ventrouwen* dan bahasa inggris dengan *belive, trust confident*.<sup>13</sup> Sedangkan dalam bahasa Indonesia kata kredit mempunyai arti kepercayaan, jadi seorang memperoleh kredit berarti memperoleh kepercayaan. Walaupun sebenarnya kredit itu tidak hanya sekedar kepercayaan.

Dalam arti yang lebih luas kredit diartikan sebagai kepercayaan. Begitu pula dalam makna latin berarti "*credere*" artinya percaya. Maksudnya percaya bagi si pemberi kredit adalah ia percaya kepada si penerima kredit bahwa kredit yang disalurkanannya pasti akan dikembalikan sesuai dengan perjanjian. Sedangkan bagi si penerima kredit menyatakan kepercayaan sehingga mempunyai kewajiban untuk membayarnya sesuai jangka waktu.<sup>14</sup>

#### **b. Jaminan Kredit**

Masalah jaminan sangat penting, tidak saja dalam masalah perkreditan tetapi juga dalam transaksi dagang atau bisnis. Di Amerika hal tersebut terkenal dengan istilah *secured transaction*. Istilah *secured transaction* bukanlah istilah yang dikenal dalam hukum Indonesia, namun sudah sering digunakan di Indonesia dalam percakapan bisnis. Suatu transaksi dagang atau bisnis, tidak hanya melibatkan adanya suatu

---

<sup>13</sup> Mariam Darus Badruzaman, *Perjanjian Kredit Bank*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1991), hal 23.

<sup>14</sup> Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan lainnya*,(Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2001), hal 104-105.

perjanjian penjualan barang yang diikuti dengan pelaksanaannya berupa penyerahan barang yang dijual dan dilakukan pembayaran, yaitu baik dengan uang tunai atau dengan alat pembayaran lain yang bukan uang tunai seperti cek atau wesel, tetapi dapat pula melibatkan pemberian security interest atau hak jaminan.<sup>15</sup>

### **3. Pengertian pembiayaan Konsumen**

Dalam rangka memasuki era pasar bebas dan dalam menunjang pertumbuhan perekonomian nasional, maka sarana penyediaan dana yang dibutuhkan masyarakat perlu diperluas. Salah satunya pembiayaan Konsumen.

Lahirnya pemberian kredit dengan sistem pembiayaan konsumen ini sebenarnya sebagai jawaban atas kenyataan-kenyataan sebagai berikut :<sup>16</sup>

- a. Bank-bank kurang tertarik/tidak cukup banyak dalam menyediakan kredit kepada konsumen, yang umumnya merupakan kredit-kredit berukuran kecil.
- b. Sumber dana yang formal lainnya banyak keterbatasan atau sitemnya kurang fleksibel atau tidak sesuai dengan kebutuhan.

---

<sup>15</sup> Yunanto, *Kedudukan Fidusia Sebagai Lembaga Jaminan Setelah Berlakunya UUHT*, (Semarang: Tesis, 1998) hal 29.

<sup>16</sup> Munir Fuady, *Op,Cit.*, hal. 163.

- c. Sistem pembayaran informal seperti yang dilakukan oleh para lintah darat atau tengkulak dirasakan sangat mencengkeram masyarakat dan sangat *usuary oriented*. Sistem pembiayaan formal lewat koperasi, seperti Koperasi Unit Desa ternyata tidak berkembang seperti yang diharapkan.

#### **4. Obyek dan Subyek Fidusia**

- a. Objek Jaminan Fidusia

Obyek jaminan Fidusia adalah benda yang dapat dimiliki dan dialihkan kepemilikannya, baik berwujud maupun tidak berwujud, terdaftar maupun tidak terdaftar, bergerak maupun tidak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan atau hipotik.

Uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia harus disebut dengan jelas dalam akta jaminan Fidusia baik identifikasi benda tersebut, maupun penjelasan surat bukti kepemilikannya dan bagi benda invebtory yang selalu berubah-ubah dan atau tetap harus dijelaskan jenis bendanya dan kualitasnya.

- b. Subyek jaminan Fidusia

Subjek Jaminan Fidusia menurut UUJF adalah Pemberi Fidusia yaitu orang perorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi objek jaminan fidusia dan penerima Fidusia dalam hal ini adalah seorang

perseorangan atau korporasi yang menerima piutang yang pembayarannya dijamin dengan fidusia.

## **5. Eksekusi**

Dalam pengertian eksekusi menurut pendapat M. Yahya Harahap dalam bukunya “RuangLingkup permasalahan Eksekusi Bidang Perdata”, memberikan pengertian sebagai berikut : “Eksekusi sebagai tindakan hukum yang dilakukan oleh pengadilan kepada pihak yang kalah dalam suatu perkara, merupakan aturan dan tata lanjutan dalam proses pemeriksaan perkara. Oleh karena itu eksekusi tiada berkesinambungan dari seluruh proses hukum acara perdata”.<sup>17</sup>

Secara umum eksekusi merupakan pelaksanaan atau keputusan pengadilan atau akta, maka pengambilan pelunasan kewajiban kreditor melalui hasil penjualan benda-benda tertentu milik debitor.

Sedangkan yang dimaksud perjanjian fidusia adalah perjanjian utang piutang kreditor kepada debitor yang melibatkan penjaminan. Jaminan tersebut kedudukannya masih dalam penguasaan pemilik jaminan.

Tetapi untuk menjamin kepastian hukum bagi kreditor maka dibuat akta yang dibuat oleh notaris dan didaftarkan ke Kantor

---

<sup>17</sup> M. Yahya Harahap, *Ruang lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, (Jakarta: PT. Gramedia, 1998), hal 1.

Pendaftaran Fidusia. Nanti kreditor akan memperoleh sertifikat jaminan fidusia berirah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dengan demikian, memiliki kekuatan hak eksekutorial langsung apabila debitor melakukan pelanggaran perjanjian fidusia kepada kreditor (*parate eksekusi*), sesuai UU No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

Akta di bawah tangan bukanlah akta otentik yang memiliki nilai pembuktian sempurna. Sebaliknya, akta otentik adalah akta yang dibuat oleh atau di depan pejabat yang ditunjuk oleh Undang-Undang dan memiliki kekuatan pembuktian sempurna. Untuk akta yang dilakukan di bawah tangan biasanya harus diotentikan ulang oleh para pihak jika hendak dijadikan alat bukti sah, misalnya di pengadilan. Pertanyaannya adalah apakah sah dan memiliki kekuatan bukti hukum suatu akta di bawah tangan. Menurut pendapat penulis, sah-sah saja digunakan asalkan para pihak mengakui keberadaan dan isi akta tersebut. Dalam prakteknya, di kampung atau karena kondisi tertentu menyebabkan hubungan hukum dikuatkan lewat akta di bawah tangan seperti dalam proses jual beli dan utang piutang. Namun, agar akta tersebut kuat, tetap harus dilegalisir para pihak kepada pejabat yang berwenang.

Saat ini, banyak lembaga pembiayaan (*finance*) dan bank (bank umum maupun perkreditan) menyelenggarakan pembiayaan bagi konsumen (*consumer finance*), sewa guna usaha (*leasing*), anjak piutang

(*factoring*). Mereka umumnya menggunakan tata cara perjanjian yang mengikutkan adanya jaminan fidusia bagi objek benda jaminan fidusia. Prakteknya lembaga pembiayaan menyediakan barang bergerak yang diminta konsumen (semisal motor atau mesin industri) kemudian diatasmakan konsumen sebagai debitur (penerima kredit/pinjaman). Konsekuensinya debitur menyerahkan kepada kreditur (pemberi kredit) secara fidusia. Artinya debitur sebagai pemilik atas nama barang menjadi pemberi fidusia kepada kreditur yang dalam posisi sebagai penerima fidusia. Praktek sederhana dalam jaminan fidusia adalah debitur/pihak yang punya barang mengajukan pembiayaan kepada kreditur, lalu kedua belah sama-sama sepakat menggunakan jaminan fidusia terhadap benda milik debitor dan dibuatkan akta notaris lalu didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia. Kreditur sebagai penerima fidusia akan mendapat sertifikat fidusia, dan salinannya diberikan kepada debitur. Dengan mendapat sertifikat jaminan fidusia maka kreditur/penerima fidusia serta merta mempunyai hak eksekusi langsung (*parate eksekusi*), seperti terjadi dalam pinjam meminjam dalam perbankan. Kekuatan hukum sertifikat tersebut sama dengan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Jika penerima fidusia mengalami kesulitan di lapangan, maka ia dapat meminta pengadilan setempat melalui juru sita membuat surat penetapan permohonan bantuan pengamanan eksekusi. Bantuan

pengamanan eksekusi ini bisa ditujukan kepada aparat kepolisian, pamong praja dan pamong desa/kelurahan dimana benda objek jaminan fidusia berada. Dengan demikian bahwa pembuatan sertifikat jaminan fidusia melindungi penerima fidusia jika pemberi fidusia gagal memenuhi kewajiban sebagaimana tertuang dalam perjanjian kedua belah pihak.

Jaminan fidusia yang tidak dibuatkan sertifikat jaminan fidusia menimbulkan akibat hukum yang kompleks dan beresiko. Kreditor bisa melakukan hak eksekusinya karena dianggap sepihak dan dapat menimbulkan kesewenang-wenangan dari kreditor. Bisa juga karena mengingat pembiayaan atas barang objek fidusia biasanya tidak *full* sesuai dengan nilai barang. Atau, debitur sudah melaksanakan kewajiban sebagian dari perjanjian yang dilakukan, sehingga dapat dikatakan bahwa diatas barang tersebut berdiri hak sebagian milik debitur dan sebagian milik kreditor. Apalagi jika eksekusi tersebut tidak melalui badan penilai harga yang resmi atau badan pelelangan umum. Tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sesuai diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan dapat digugat ganti kerugian.

Dalam konsepsi hukum pidana, eksekusi objek fidusia di bawah tangan masuk dalam tindak pidana Pasal 368 KUHPidana jika kreditor



melakukan pemaksaan dan ancaman perampasan. Pasal ini menyebutkan:<sup>18</sup>

- a) Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat utang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan.
- b) Ketentuan pasal 365 ayat kedua, ketiga, dan keempat berlaku bagi kejahatan ini.

Situasi ini dapat terjadi jika kreditor dalam eksekusi melakukan pemaksaan dan mengambil barang secara sepihak, padahal diketahui dalam barang tersebut sebagian atau seluruhnya milik orang lain. Walaupun juga diketahui bahwa sebagian dari barang tersebut adalah milik kreditor yang mau mengeksekusi tetapi tidak didaftarkan dalam di kantor fidusia. Bahkan pengenaan pasal-pasal lain dapat terjadi mengingat bahwa dimana-mana eksekusi merupakan bukan hal yang mudah, untuk itu butuh jaminan hukum dan dukungan aparat hukum

---

<sup>18</sup> Grace, P, Nugroho, *Eksekusi Terhadap Objek Perjanjian Fidusia Dengan Akta Dibawah Tangan*, (<http://www.hukumonline.com>), 2009.

secara legal. Inilah urgensi perlindungan hukum yang seimbang antara kreditor dan debitor.

Bahkan apabila debitor mengalihkan benda objek fidusia yang dilakukan dibawah tangan kepada pihak lain tidak dapat dijerat dengan UU No. 42 Tahun 1999 Tentang jaminan fidusia, karena tidak syah atau legalnya perjanjian jaminan fidusia yang dibuat. Mungkin saja debitor yang mengalihkan barang objek jaminan fidusia di laporkan atas tuduhan penggelapan sesuai Pasal 372 KUHPidana menandakan: “Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.

Oleh kreditor, tetapi ini juga bisa jadi blunder karena bisa saling melaporkan karena sebagian dari barang tersebut menjadi milik berdua baik kreditor dan debitor, dibutuhkan keputusan perdata oleh pengadilan negeri setempat untuk mendudukan porsi masing-masing pemilik barang tersebut untuk kedua belah pihak. Jika hal ini ditempuh maka akan terjadi proses hukum yang panjang, melelahkan dan menghabiskan biaya yang tidak sedikit. Akibatnya, margin yang hendak dicapai perusahaan tidak terealisasi bahkan mungkin merugi, termasuk rugi waktu dan pemikiran.

Lembaga pembiayaan yang tidak mendaftarkan jaminan fidusia sebenarnya rugi sendiri karena tidak punya hak eksekutorial yang legal. Problem bisnis yang membutuhkan kecepatan dan *customer service* yang prima selalu tidak sejalan dengan logika hukum yang ada. Mungkin karena kekosongan hukum atau hukum yang tidak selalu secepat perkembangan zaman. Bayangkan, jaminan fidusia harus dibuat di hadapan notaris sementara lembaga pembiayaan melakukan perjanjian dan transaksi fidusia di lapangan dalam waktu yang relatif cepat.

Saat ini banyak lembaga pembiayaan melakukan eksekusi pada objek barang yang dibebani jaminan fidusia yang tidak didaftarkan. Bisa bernama remedial, rof coll, atau remove. Selama ini perusahaan pembiayaan merasa tindakan mereka aman dan lancar saja. Menurut penulis, hal ini terjadi karena masih lemahnya daya tawar nasabah terhadap kreditor sebagai pemilik dana. Ditambah lagi pengetahuan hukum masyarakat yang masih rendah. Kelemahan ini dimanfaatkan oleh pelaku bisnis industri keuangan, khususnya sektor lembaga pembiayaan dan bank yang menjalankan praktek jaminan fidusia dengan akta di bawah tangan.

Dalam proses eksekusi kita mengetahui Bahwa asas perjanjian "*pacta sun servanda*" yang menyatakan bahwa perjanjian yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersepakat, akan menjadi undang-undang bagi keduanya, tetap berlaku dan menjadi asas utama dalam hukum perjanjian.

Tetapi terhadap perjanjian yang memberikan penjaminan fidusia di bawah tangan tidak dapat dilakukan eksekusi. Proses eksekusi harus dilakukan dengan cara mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri melalui proses hukum acara yang normal hingga turunnya putusan pengadilan. Inilah pilihan yang prosedural hukum formil agar dapat menjaga keadilan dan penegakan terhadap hukum materiil yang dikandungnya.

Proses ini hampir pasti memakan waktu panjang, kalau para pihak menggunakan semua upaya hukum yang tersedia. Biaya yang musti dikeluarkan pun tidak sedikit. Tentu saja, ini sebuah pilihan dilematis. Dalih mengejar margin besar juga harus mempertimbangkan rasa keadilan semua pihak. Masyarakat yang umumnya menjadi nasabah juga harus lebih kritis dan teliti dalam melakukan transaksi. Sementara bagi Pemerintah, kepastian, keadilan dan ketertiban hukum adalah penting.

#### **F. Metode Penelitian**

Yang dimaksud dengan metode, adalah proses, prinsip – prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati – hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk mencegah masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, ( Jakarta : UI Press, 1986 ), hal 6.

Sesuai dengan tujuan penelitian hukum ini, maka dalam penelitian hukum kita mengenal adanya penelitian secara yuridis empiris. Penelitian normatif dilakukan dengan meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder dan juga disebut penelitian kepustakaan. Penelitian hukum empiris dilakukan dengan wawancara kepada responden sebagai nara sumber.

Menurut Sutrisno Hadi, metode penelitian merupakan penelitian yang menyajikan bagaimana caranya atau langkah – langkah yang harus diambil dalam suatu penelitian secara sistematis dan logis sehingga dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah :<sup>20</sup>

### **1. Pendekatan Masalah**

Penelitian yuridis empiris dilakukan dengan cara meneliti di lapangan dengan cara wawancara dengan responden yang merupakan data primer dan meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder dan juga disebut penelitian kepustakaan.<sup>21</sup>

Penelitian mengenai pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia dalam penyelesaian kredit macet di PT. Adira Finance di Kota Makassar adalah merupakan penelitian empiris, karena penelitian ini menitik beratkan pada

---

<sup>20</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Riset Nasional*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), hal. 46.

<sup>21</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), hal. 9.

penelitian di lapangan yang menjelaskan situasi serta Hukum yang terjadi dan berlaku dalam masyarakat secara menyeluruh, sistematis, faktual, akurat mengenai fakta – fakta yang semuanya berhubungan dengan judul tesis “Eksekusi Jaminan Fidusia Dalam Penyelesaian Kredit Macet Di PT. Adira Finance Di Kota Makassar.

Dalam penelitian tesis ini lokasi yang diambil adalah perusahaan pembiayaan yang bergerak di bidang pembiayaan sepeda motor Yamaha di Kota Makassar yaitu PT. Adira Finance. Dalam menjalankan usahanya melakukan pembiayaan dalam bentuk penyediaan kendaraan sepeda motor untuk digunakan oleh perorangan atau oleh perusahaan.

## **2. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian ini adalah berupa penelitian studi kasus dengan penguraian secara Deskriptif Analistis. Yaitu dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan-keadaan atau gejala-gejala lainnya<sup>22</sup>.

Istilah analistik mengandung makna mengelompokkan, menghubungkan, membandingkan dan memberi makna pelaksanaan perjanjian melalui pembiayaan konsumen melalui PT. Adira Finance di Kota Makassar.

---

<sup>22</sup> *Ibid*, hal.10

### **3. Subyek dan Obyek Penelitian**

Subyek diartikan sebagai manusia dalam pengertian kesanggupan dalam berakal budi dan kesadaran yang berguna untuk mengenal atau mengetahui sesuatu.<sup>23</sup> Subyek penelitian adalah pelaku yang terkait dengan obyek penelitian ini adalah:

- a. PT. Adira Finance di Kota Makassar
- b. Penerima Fasilitas (pihak debitur)

Obyek penelitian adalah sesuatu yang menjadi pokok pembicaraan dan tulisan serta menjadi sasaran penelitian. Dalam hal ini obyek penelitiannya adalah kredit macet di Perusahaan Pembiayaan PT. Adira Finance di Kota Makassar.

### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Menurut Soerjono Soekanto dalam penelitian lazimnya dikenal jenis alat pengumpul data, yaitu:

- 1) Studi dokumen atau bahan pustaka;
- 2) Wawancara.<sup>24</sup>

Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis empiris sehingga penulis

---

<sup>23</sup> Komaruddin, *Kamus Istilah Karya Tulis Ilmiah*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2002), hal 256

<sup>24</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1984), hal 66

menggunakan metode pengumpulan data primer dan data sekunder.

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari masyarakat.<sup>25</sup>

Data primer ini diperoleh melalui wawancara bebas terpimpin, yaitu dengan mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan sebagai pedoman, tetapi tidak menutup kemungkinan adanya variasi pertanyaan sesuai dengan situasi ketika wawancara berlangsung. Wawancara dilakukan dengan pihak yang berwenang dan terkait serta berkompeten dalam bidang hukum jaminan khususnya terhadap persoalan eksekusi jaminan fidusia dalam penyelesaian kredit macet di Perusahaan Pembiayaan Kendaraan Sepeda Motor PT. Adira Finance di Kota Makassar, yaitu :

- 1) Branch Manager PT. Adira Finance Kota Makassar;
- 2) Konsumen PT. Adira Finance Kota Makassar yang mengalami kredit macet diambil 10 konsumen.

- b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan kepustakaan.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup>Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), hal 24.

<sup>26</sup> *Ibid.*, hal 24



Data sekunder ini diperoleh melalui studi kepustakaan yang berkaitan dengan fokus penelitian, yang terdiri dari:

- 1) Data sekunder umum, yang diteliti adalah:
  - a) Data sekunder yang bersifat pribadi, yang terdiri dari:
    - (1) Dokumen-dokumen pribadi;
    - (2) Data pribadi yang tersimpan di lembaga-lembaga.
  - b) Data sekunder yang bersifat publik, yang terdiri dari:
    - (1) Data arsip;
    - (2) Data resmi pada instansi-instansi pemerintah;
    - (3) Data yang dipublikasikan.
- 2) Data sekunder di bidang hukum yang berhubungan dengan fokus penelitian, dapat dibedakan menjadi:
  - a) Bahan hukum primer, antara lain terdiri dari:
    - (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
    - (2) Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;
    - (3) Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia;
    - (4) Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan;

- (5) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan Dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan;
- (6) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 448/KMK.017/2000 tentang Perusahaan Pembiayaan.

b) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer, yang diperoleh dari:

- (1) Rancangan peraturan perundang-undangan;
- (2) Hasil karya ilmiah para sarjana;
- (3) Hasil-hasil penelitian.

c) Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berupa:

- (1) Kamus hukum;
- (2) Kamus bahasa.<sup>27</sup>

## **5. Teknik Analisis Data**

---

<sup>27</sup> *Ibid.*, hal 24 - 25

Teknik analisis data yang penulis lakukan adalah deskriptif kualitatif yakni dengan memberikan gambaran secara khusus berdasarkan data yang dikumpulkan secara kualitatif. Metode ini memusatkan diri pada pemecahan masalah-masalah yang ada pada masa sekarang, pada masalah-masalah yang aktual. Data yang dikumpulkan mula-mula disusun, dijelaskan dan kemudian dianalisa.<sup>28</sup>

Analisis dilakukan atas suatu yang telah ada, berdasarkan data yang telah masuk dan diolah sedemikian rupa dengan meneliti kembali, sehingga analisis dapat diuji kebenarannya. Analisis data ini dilakukan peneliti secara cermat dengan berpedoman pada tipe dan tujuan dari penelitian yang dilakukan.<sup>29</sup>

## **G. Sistematika Penulisan**

---

<sup>28</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op. Cit.*, hal. 28

<sup>29</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Op. Cit.*, hal. 35

Untuk penulisan dapat memberikan gambaran yang komprehensif, maka penyusunan hasil penelitian perlu dilakukan secara runtut dan sistematis sebagai berikut :

## **BAB I : Pendahuluan**

Dalam Bab satu ini dibahas mengenai latar belakang yang menjelaskan alasan-alasan objektif yang mendorong dilakukannya penelitian ini, perumusan masalah yang menjadi fokus penuntun dalam penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, serta terakhir adalah sistematika yang memberikan gambaran mengenai isi dari tesis ini.

## **BAB II : Tinjauan Pustaka**

Berisikan tinjauan tinjauan umum tentang pembiayaan konsumen, tinjauan tentang perjanjian, tinjauan tentang perjanjian pembiayaan konsumen, tinjauan tentang eksekusi

## **BAB III : Hasil Penelitian Dan Pembahasan**

Membahas mengenai hasil penelitian yang berupa data-data yang diperoleh, sesuai yang dijelaskan pada bab pendahuluan, kemudian langsung dianalisa. Analisa diarahkan untuk menjawab semua rumusan masalah. Adanya kesenjangan antara das sollen dengan das sein dengan melihat berbagai faktor yang menghambat pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia dalam penyelesaian kredit macet pada

perusahaan pembiayaan sepeda motor PT. Adira Finance di Kota Makassar, Propinsi Sulawesi Selatan.

#### **BAB IV : Penutup**

Berisikan kesimpulan yang diperoleh dari permasalahan yang diajukan berdasarkan temuan dilapangan dan saran-saran dari penulis.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum Tentang Jaminan Fidusia**

##### **1. Sejarah dan Pengertian Jaminan Fidusia**

###### **a. Sejarah Jaminan Fidusia**

Jaminan fidusia lahir karena ketentuan undang-undang yang mengatur tentang lembaga *pand* (gadai) mengandung banyak kekurangan, tidak memenuhi kebutuhan masyarakat dan tidak dapat mengikuti perkembangan masyarakat.

Pasal 1152 ayat 2 KUH Perdata tentang gadai mensyaratkan bahwa kekuasaan atas benda yang digadaikan tidak boleh berada pada pemberi gadai (*azas inbezitstelling*). Ini merupakan hambatan yang berat bagi gadai atas benda-benda bergerak berwujud, karena pemberi gadai tidak dapat menggunakan benda-benda tersebut untuk keperluannya.<sup>30</sup> Hambatan tersebut kemudian diatasi dengan mempergunakan lembaga fidusia yang diakui oleh Yurisprudensi Belanda tahun 1929 dan diikuti oleh Arrest Hooggerechtshof di Indonesia tahun 1932, bahwa pada hakekatnya dalam hal jaminan fidusia memang terjadi pengalihan hak kepemilikan atas suatu benda berdasarkan kepercayaan antara Pemberi Fidusia dan

---

<sup>30</sup> Purwahid dan Kashadi. *Hukum Jaminan Fidusia*, (Semarang : Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2008), hal. 34-35.

Penerima Fidusia. Pengalihan hak kepemilikan dimaksud semata-mata sebagai jaminan bagi pelunasan utang bukan untuk seterusnya dimiliki oleh Penerima Fidusia.

Lahirnya Arrest Hooggerechtshof tersebut dipengaruhi oleh kebutuhan-kebutuhan yang mendesak dari pengusaha-pengusaha kecil, pengecer, pedagang menengah, pedagang grosir yang memerlukan fasilitas kredit untuk usahanya. Perkembangan perundang-undangan fidusia sangat lambat, karena undang-undang yang mengatur tentang jaminan fidusia baru diundangkan pada tahun 1999, berkenaan dengan bergulirnya era reformasi.<sup>31</sup>

#### b. Pengertian Jaminan Fidusia

Fidusia atau lengkapnya "*Fiduciaire Eigendomsoverdracht*" sering disebut sebagai Jaminan Hak Milik Secara Kepercayaan, merupakan suatu bentuk jaminan atas benda-benda bergerak disamping gadai di mana dasar hukumnya yurisprudensi. Pada fidusia, berbeda dari gadai, yang diserahkan sebagai jaminan kepada kreditor adalah hak milik sedang barangnya tetap dikuasai oleh debitor, sehingga yang terjadi adalah penyerahan secara *constitutum possessorium*.

Dalam ketentuan Pasal 1 butir 1 Undang-undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, disebutkan bahwa: "Fidusia adalah

---

<sup>31</sup> Salim H.S. *Perkembangan Hukum Jaminan Indonesia*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004), hal 60.

pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.”

Sebagaimana telah dijelaskan di atas, bahwa kepercayaan merupakan syarat utama di dalam lalu lintas perkreditan. Seorang nasabah memperoleh kredit karena adanya kepercayaan dari bank. Dalam fidusia, benda jaminan tidak diserahkan secara nyata oleh debitor kepada kreditor, yang diserahkan hanyalah hak milik secara kepercayaan. Benda jaminan masih tetap dikuasai oleh debitor dan debitor masih tetap dapat mempergunakan untuk keperluan sehari-hari.

Jaminan fidusia dituangkan dalam bentuk perjanjian. Biasanya dalam memberikan pinjaman uang, kreditor mencantumkan dalam perjanjian itu bahwa debitor harus menyerahkan barang-barang tertentu sebagai jaminan pelunasan utangnya.<sup>32</sup>

Dalam ketentuan Pasal 1 butir 2 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia disebutkan bahwa :

”Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang

---

<sup>32</sup> Oey Hoey Tiong, *Fidusia sebagai Jaminan Unsur-unsur Perikatan*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1984), hal. 21



memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya.”

Dari pengertian di atas, dapat diketahui unsur-unsur jaminan fidusia meliputi adanya hak jaminan; adanya obyek, yaitu benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan; benda yang menjadi obyek jaminan tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia; dan memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia.

Perjanjian Jaminan Fidusia merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi prestasi.<sup>33</sup>

## **2. Ciri- ciri Lembaga Fidusia**

Seperti halnya hak tanggungan, Lembaga Jaminan Fidusia yang kuat mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :

- a. Memberikan kedudukan yang mendahulukan kepada kreditor (penerima fidusia) terhadap kreditor lainnya. (Pasal 27 Undang-undang jaminan Fidusia)

Penerima fidusia memiliki hak yang didahulukan terhadap kreditor lainnya. Hak yang didahulukan dihitung sejak tanggal pendaftaran

---

<sup>33</sup> Purwahid Patrik dan Kashadi, *Op. Cit*, hal. 36.

benda yang menjadi objek jaminan fidusia pada kantor pendaftaran fidusia.

Hak yang didahulukan yang dimaksud adalah hak penerima fidusia untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Hak yang didahulukan dari penerima fidusia tidak hapus karena adanya kepailitan dan likuidasi pemberi fidusia. Ketentuan dalam hal ini berhubungan dengan ketentuan bahwa jaminan fidusia merupakan agunan atas kebendaan bagi pelunasan utang. Disamping itu, ketentuan dalam undang-undang tentang kepailitan menentukan bahwa benda yang menjadi obyek jaminan fidusia berada diluar kepailitan dan atau likuidasi.<sup>34</sup>

Apabila atas benda yang sama menjadi objek jaminan fidusia lebih dari 1 (satu) perjanjian jaminan fidusia, maka hak yang didahulukan ini diberikan kepada pihak yang lebih dahulu mendaftarkannya pada kantor pendaftaran fidusia.

- b. Selalu mengikuti obyek yang dijaminakan di tangan siapapun objek itu berada (*droit de suite*) (pasal 20 Undang-undang fidusia).

Jaminan fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi obyek jaminan fidusia dalam tangan siapapun benda itu berada, kecuali

---

<sup>34</sup> *Ibid*, hal 36-37

pengalihan atas benda persediaan yang menjadi obyek jaminan fidusia.<sup>35</sup>

Ketentuan ini merupakan pengakuan atau prinsip “*droit de suite*” yang telah merupakan bagian dari peraturan perundang-undangan Indonesia dalam kaitanya dengan hak mutlak atas kebendaan (inrem)

- c. Memenuhi asas spesialisitas dan publisitas sehingga mengikat pihak ketiga dan memberikan jaminan kepastian hukum kepada pihak-pihak yang berkepentingan (Pasal 6 dan 11 Undang-undang Fidusia).

Akta Jaminan Fidusia yang dibuat Notaris sekurang-kurangnya memuat :

- 1) Identitas pihak pemberi dan penerima fidusia;
- 2) Data perjanjian pokok yang dijamin dengan fidusia;
- 3) Uraian mengenai benda yang menjadi obyek fidusia;
- 4) Nilai penjaminan;
- 5) Nilai benda yang menjadi objek fidusia;

Selanjutnya dalam hal ini benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia. Hal ini merupakan terobosan penting yang melahirkan fidusia sehingga

---

<sup>35</sup> Gunawan Wijdjaja dan Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007), hal 133.

dapat memenuhi asas publisitas (semakin terpublikasi jaminan hutang, akan semakin baik, sehingga kreditor atau khalayak ramai dapat mengetahui atau punya akses untuk mengetahui informasi-informasi penting di sekitar jaminan hutang tersebut.

d. Mudah dan pasti pelaksanaan eksekusinya (Pasal 29 Undang-undang Fidusia)

Dalam hal debitor atau pemberi fidusia cidera janji, pemberi fidusia wajib menyerahkan obyek jaminan fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi. Eksekusi dapat dilaksanakan dengan cara pelaksanaan titel eksekutorial oleh kreditor atau penerima fidusia, artinya langsung melaksanakan eksekusi melalui lembaga parate eksekusi atau penjualan obyek jaminan fidusia atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan dari hasil penjualan. Dalam hal akan dilakukan penjualan dibawah tangan, maka harus dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia.

### **3. Obyek dan Subyek Jaminan Fidusia**

a. Obyek Jaminan Fidusia

Sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, maka yang menjadi obyek Jaminan Fidusia adalah benda bergerak yang terdiri dari benda dalam persediaan

(*inventory*), benda dagangan, piutang, peralatan mesin, dan kendaraan bermotor. Setelah berlakunya UU NO.42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, maka obyek jaminan fidusia diberikan pengertian yang luas. Berdasarkan undang-undang ini, obyek jaminan fidusia dibagi 2 macam, yaitu : benda bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud; dan benda tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan.

Sebagai contoh bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan dalam hal ini yang berkaitan dengan tanah dan bangunan, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3 Huruf a Undang-undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

#### b. Subyek Jaminan Fidusia

Subyek Jaminan Fidusia adalah Pemberi Fidusia dan Penerima Fidusia. Pemberi Fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia, sedangkan Penerima Fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan Jaminan Fidusia.<sup>36</sup>

### **4. Proses Terjadinya Jaminan Fidusia**

Dalam proses terjadinya jaminan fidusia di laksanakan melalui dua tahap yaitu :

---

<sup>36</sup> Purwahid Patrik dan Kashadi, *Op, Cit*, hal 39.

## 1. Tahap Pembebanan Jaminan Fidusia

Pembebanan benda dengan jaminan fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta jaminan fidusia.

Dengan demikian, akta notaris di sini merupakan syarat materil untuk berlakunya ketentuan-ketentuan Undang-undang Jaminan Fidusia atas perjanjian penjaminan fidusia, disamping juga sebagai alat bukti.

Perlu diketahui, bahwa suatu perjanjian pada umumnya tidak lahir pada saat penuangannya dalam suatu akta, tetapi sudah ada sebelumnya, yaitu sudah ada sejak adanya kesepakatan antara para pihak yang memenuhi syarat Pasal 1320 KUH Perdata dan penuangannya dalam akta hanya dimaksudkan untuk mendapatkan alat bukti saja.

Akta notariil merupakan salah satu wujud akta otentik sebagai yang dimaksud dalam Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUH Perdata yang memberikan kekuatan pembuktian yang sempurna terhadap para pihak dan ahli waris atau orang yang mendapatkan hak dari padanya.

Alasan Undang-undang menetapkan dengan Akta Notaris adalah :

- a. Akta Notaris adalah akta otentik sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna;

b. Objek jaminan fidusia pada umumnya adalah benda bergerak;

c. Undang-undang melarang adanya fidusia ulang;

Akta jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Undang-undang Fidusia sekurang-kurangnya memuat :

a. Identitas pihak pemberi dan penerima fidusia

Identitas tersebut meliputi nama lengkap, agama, tempat tinggal atau kedudukan dan tanggal lahir, jenis kelamin, status perkawinan, dan pekerjaan.

b. Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia, yaitu mengenai macam perjanjian, dan utang yang dijamin dengan fidusia.

c. Uraian mengenai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia.

Uraian mengenai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia cukup dilakukan dengan mengidentifikasi benda tersebut, dan dijelaskan mengenai surat bukti kepemilikannya. Dalam hal benda yang menjadi obyek jaminan fidusia merupakan benda dalam persediaan (*inventory*) yang selalu berubah-ubah dan tidak tetap, seperti stok bahan baku, barang jadi, maka akta jaminan fidusia dicantumkan uraian mengenai jenis, merek, kualitas dari benda tersebut.

d. Nilai penjaminan;

e. Nilai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia.

## 2. Tahap Pendaftaran Jaminan Fidusia

Tujuan pendaftaran fidusia adalah melahirkan jaminan fidusia bagi penerima fidusia, memberikan kepastian kepada kreditor lain mengenai benda yang telah dibebani jaminan fidusia dan memberikan hak yang didahulukan terhadap kreditor dan untuk memenuhi asas publisitas karena kantor pendaftaran terbuka untuk umum.<sup>37</sup>

Benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan termasuk benda yang dibebani dengan jaminan fidusia berada di luar wilayah Republik Indonesia. Pendaftaran benda yang dibebani dengan jaminan fidusia dilaksanakan di tempat kedudukan pemberi fidusia dan dilakukan pada kantor Pendaftaran Fidusia yang merupakan bagian dalam lingkungan Departemen kehakiman. Permohonan pendaftaran dilakukan oleh penerima fidusia, kuasa atau wakilnya dengan melampirkan pernyataan pendaftaran jaminan fidusia, yang meliputi :

- a. Identitas pihak dan penerima fidusia;
- b. Tanggal, nomor akta jaminan fidusia, nama dan tempat kedudukan notaris yang membuat akta jaminan fidusia;
- c. Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia;
- d. Uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia;

---

<sup>37</sup> *Ibid*, hal 41.



e. Nilai penjaminan, dan

f. Nilai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia.<sup>38</sup>

Kemudian Kantor Pendaftaran Fidusia mencatat jaminan dalam Buku Daftar Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran guna melakukan pengecekan data setelah dilakukan pendaftaran, maka kantor Pendaftaran fidusia menerbitkan Sertifikat Jaminan Fidusia kepada penerima fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran jaminan fidusia.

Ketentuan ini dimaksudkan agar Kantor Pendaftaran Fidusia tidak melakukan penilaian terhadap kebenaran yang dicantumkan dalam pernyataan pendaftaran jaminan fidusia, akan tetapi hanya melakukan pengecekan data yang dimuat dalam pernyataan pendaftaran fidusia. Tanggal pencatatan jaminan fidusia dalam buku Daftar Fidusia ini dianggap sebagai lahirnya jaminan fidusia.

Dengan demikian pendaftaran jaminan fidusia dalam Buku Daftar Fidusia, merupakan perbuatan konstitutif yang melahirkan jaminan fidusia. Penegasan lebih lanjut dapat kita lihat dalam ketentuan Pasal 28 Undang-undang Fidusia yang menyatakan apabila atas benda yang sama menjadi obyek jaminan lebih dari 1 (satu) perjanjian jaminan fidusia, maka kreditor yang lebih dahulu

---

<sup>38</sup> *Ibid*, hal 42.

mendaftarkannya adalah penerima fidusia. Hal ini penting diperhatikan oleh kreditor yang menjadi pihak dalam perjanjian jaminan fidusia, karena hanya penerima fidusia, kuasa atau wakilnya yang boleh melakukan pendaftaran jaminan fidusia.

Sebagai bukti bagi kreditor bahwa ia merupakan penerima jaminan fidusia adalah Sertifikat Jaminan Fidusia yang diterbitkan Kantor Pendaftaran Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran. Sertifikat ini sebenarnya merupakan salinan dari Buku Daftar Fidusia yang memuat catatan tentang hal-hal yang sama dengan data dan keterangan yang ada pada saat pernyataan pendaftaran.

Dalam Sertifikat Jaminan Fidusia dicantumkan kata-kata:

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”, sehingga Sertifikat Jaminan Fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Maksudnya, bahwa putusan tersebut langsung dapat dilaksanakan tanpa melalui pengadilan dan bersifat final serta mengikat para pihak untuk melaksanakan putusan tersebut.<sup>39</sup>

---

<sup>39</sup> *Ibid*, hal 43.

## **5. Hapusnya Jaminan Fidusia**

Sesuai dengan Pasal 4 Undang-undang Jaminan fidusia, jaminan fidusia ini merupakan perjanjian aksesoir dari perjanjian dasar yang menerbitkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi.

Sebagaimana suatu perjanjian aksesoir dari jaminan fidusia demi hukum hapus, bila utangnya pada perjanjian pokok, yang menjadi sumber lahirnya perjanjian penjaminan fidusia atau utang yang dijamin dengan fidusia menyatakan secara tegas bahwa jaminan fidusia hapus karena :

### **a. Hapusnya utang yang dijamin dengan fidusia**

Jadi sesuai dengan sifat ikutan dari jaminan fidusia, maka adanya jaminan fidusia tercantum pada adanya piutang yang dijamin pelunasannya. Apabila piutang tersebut habis karena hapusnya utang, maka dengan sendirinya jaminan fidusia yang bersangkutan hapus, dan hapusnya utang ini dapat dibuktikan dengan bukti pelunasan atau bukti hapusnya hutang yang berupa keterangan yang dibuat oleh kreditor.

Utang yang pelunasannya dijamin dengan jaminan fidusia dapat berupa :

- 1) Utang yang telah ada;
- 2) Utang yang akan timbul dikemudian hari yang telah di perajakan dalam jumlah tertentu. Utang yang akan timbul dikemudian hari

yang dikenal dengan istilah "kontijen", misalnya utang yang timbul dari pembayaran yang dilakukan oleh kreditor untuk kepentingan debitor dalam rangka pelaksanaan garansi bank.

- 3) Utang yang pada eksekusinya dapat ditentukan jumlahnya berdasarkan perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban memenuhi prestasi. Utang dimaksud adalah utang bunga atas pinjaman pokok dan biaya lainnya yang jumlahnya dapat ditentukan dikemudian.<sup>40</sup>

b. Pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh penerima fidusia

Seperti halnya pada hapusnya hutang yang dijaminan dengan fidusia, maka hapusnya fidusia karena pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh penerima fidusia adalah wajar, mengingat pihak penerima fidusia sebagai yang memiliki hak atas fidusia tersebut bebas untuk mempertahankan atau melepaskan haknya.

c. Musnahnya benda yang menjadi obyek jaminan fidusia

Musnahnya benda yang menjadi obyek jaminan fidusia tidak akan menghapus klaim asuransi, kecuali diperjanjikan lain. Jadi apabila benda yang menjadi obyek jaminan fidusia musnah dan benda tersebut diasuransikan, maka klaim asuransi akan mengganti jaminan fidusia.

---

<sup>40</sup> Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Op,Cit.*, hal 156-157.

## **6. Eksekusi Jaminan Fidusia**

Apabila debitur wanprestasi, maka menurut Pasal 29 Undang-undang Nomor 42 tentang Jaminan Fidusia, yang menjadi obyek jaminan fidusia dapat dilakukan eksekusi dengan cara :

- a. Pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 (2) oleh Penerima Fidusia;
- b. Penjualan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan;
- c. Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi dan Penerima Fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.

Dalam rangka pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia, debitur wajib menyerahkan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia. Apabila debitur tidak menyerahkan jaminan fidusia tersebut pada waktu eksekusi dilaksanakan, kreditor berhak mengambil benda yang menjadi obyek jaminan fidusia tersebut dan kalau perlu meminta bantuan pihak yang berwenang.

Dalam hal benda yang menjadi obyek jamian fidusia terdiri atas benda atas benda perdagangan atau efek yang dapat diperjual belikan di pasar atau bursa, penjualannya dapat dilakukan ditempat-tempat tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Setiap janji untuk melaksanakan eksekusi terhadap obyek jaminan fidusia dengan cara bertentangan dengan ketentuan tersebut diatas batal demi hukum serta setiap janji memberikan kewenangan kepada pemberi fidusia untuk memiliki benda yang menjadi obyek jamian fidusia apabila debitor cidera janji adalah batal demi hukum.

Dalam hal hasil eksekusi melebihi nilai seluruh sisa seluruh utang debitor, kreditor wajib mengembalikan kelebihan tersebut kepada debitor, namun apabila hasil eksekusi tidak mencukupi untuk pelunasan utang, debitor tetap bertanggung jawab atas utang yang belum dibayar.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Kredit**

### **1. Pengertian Kredit**

Kata kredit berasal dari bahasa Romawi "*credere*" yang artinya "percaya". Dalam bahasa Belanda istilahnya "*vertrouwen*", dalam bahasa Inggris "*believe*" atau "*trust*" atau "*confidence*", yang kesemuanya berarti percaya<sup>41</sup>.

---

<sup>41</sup> Mariam Darus Badruzaman, *Perjanjian Kredit Bank* ( Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1991), hal 23.

Jika dihubungkan dengan bank, maka terkandung pengertian bahwa bank selaku pemberi kredit percaya untuk meminjamkan sejumlah uang kepada nasabah karena debitur dapat dipercaya kemampuannya untuk membayar lunas pinjamannya setelah jangka waktu tertentu.

Dalam masyarakat umum, istilah kredit sudah tidak asing lagi dan bahkan dapat dikatakan populer dan merakyat, sehingga dalam bahasa sehari-hari sudah dicampur-adukan begitu saja dengan istilah hutang. Tetapi, sungguh pun kata kredit sudah berkembang kemana-mana, dalam tahap apapun dan kemana pun arah perkembangannya, dalam setiap kata kredit tetap mengandung unsur “kepercayaan”, walaupun sebenarnya kredit itu bukan hanya sekedar kepercayaan.

Simorangkir, merumuskan bahwa “kredit adalah pemberian prestasi (misalnya uang dan barang) dengan balas prestasi (kontra prestasi), akan terjadi pada waktu mendatang.”<sup>42</sup>

Undang-undang Perbankan menggunakan dua istilah yang berbeda yaitu “kredit” dan “pembiayaan berdasarkan prinsip syariah”. Penggunaan kedua istilah itu disesuaikan dengan dinamika perkembangan perbankan saat ini dimana selain bank-bank yang menjalankan usaha secara konvensional berkembang juga bank-bank berdasarkan prinsip syariah. Bank yang menjalankan usahanya secara konvensional menyebutnya

---

<sup>42</sup> Simorangkir, *Seluk Beluk Bank Komersil*, (Jakarta : PT. Aksara Persada Indonesia, 1988) , hal 91.

sebagai “kredit”, sedangkan bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah menggunakan istilah “pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.

Pasal 1 angka (11) Undang-undang Perbankan memberikan definisi tentang kredit : “Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.

Sedangkan tentang pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, dirumuskan dalam Pasal 1 angka (12) UU Perbankan, sebagai berikut: “Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.”

Berdasarkan rumusan pengertian kedua istilah tersebut, perbedaannya terletak pada bentuk kontra prestasi yang akan diberikan oleh nasabah peminjam (debitur) kepada pihak bank selaku kreditur atas pemberian kredit atau pembiayaan dimaksud. Pada bank dengan prinsip konvensional kontra prestasi yang diberikan debitur adalah berupa “bunga”, sedangkan pada bank dengan prinsip syariah kontraprestasinya



berupa imbalan atau bagi hasil sesuai dengan kesepakatan bersama.

Dengan demikian, kredit dan atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah merupakan perjanjian pinjam-meminjam (uang) yang dilakukan antara bank dengan pihak lain dalam hal ini nasabah peminjam dana. Perjanjian mana dibuat atas dasar kepercayaan bahwa peminjam dalam tenggang waktu tertentu akan melunasi atau mengembalikan uang atau tagihan tersebut kepada bank disertai bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan.

Dari pengertian-pengertian di atas terlihat dengan jelas adanya beberapa unsur kredit. Tentang hal ini, Suyatno mengemukakan bahwa unsur-unsur kredit adalah sebagai berikut :

- a. Kepercayaan, yaitu keyakinan dari si pemberi kredit bahwa prestasi yang diberikannya baik dalam bentuk uang, barang atau jasa akan benar-benar diterimanya kembali dalam jangka waktu tertentu dimasa yang akan datang.
- b. Tenggang waktu, yaitu suatu masa yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontra prestasi yang akan diterimanya pada masa yang akan datang.
- c. *Degree of risk*, yaitu tingkat resiko yang akan dihadapi sebagai akibat dari adanya jangka waktu yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontra prestasi yang akan diterima dikemudian hari. Semakin lama kredit diberikan berarti semakin

tinggi pula tingkat resikonya.

- d. Prestasi atau objek kredit tidak saja diberikan dalam bentuk uang tetapi juga dalam bentuk barang atau jasa. Namun karena kehidupan ekonomi modern sekarang ini didasarkan kepada uang, maka transaksi-transaksi kredit dalam bentuk uanglah yang lazim dalam praktek perkreditan.<sup>43</sup>

Tanpa mengenyampingkan unsur-unsur yang lain, unsur terpenting dalam suatu pemberian kredit adalah kepercayaan. Untuk memperoleh kepercayaan tersebut haruslah sampai pada suatu keyakinan sejauh mana konsep penilaian kredit dapat terpenuhi dengan baik.

Menurut Halle menyatakan, jika seorang bankir memberikan pinjaman kepada perorangan atau perusahaan, bankir tersebut membutuhkan penilaian kredit dalam bentuk analisis kredit untuk membantu menentukan resiko yang ada atau yang mungkin terjadi dari pinjaman yang diberikan. Untuk itu analisis kredit amat penting, karena berguna untuk :

- a. Menentukan berbagai resiko yang akan dihadapi oleh bank dalam memberikan kredit kepada seseorang atau badan usaha.
- b. Mengantisipasi kemungkinan pelunasan kredit tersebut karena bank telah mengetahui kemampuan pelunasan melalui analisis *cashflow*

---

<sup>43</sup>Thomas Suyatno, et al., *Dasar-dasar Perkreditan*,(Jakarta:PT. Gramedia Pustaka Utama,2003), hal 14.

usaha debitur.

- c. Mengetahui jenis kredit, jumlah kredit dan jangka waktu kredit yang dibutuhkan oleh usaha debitur, sehingga bank dapat melakukan penyesuaian dengan struktur dana yang dipersiapkan untuk digunakan.
- d. Mengetahui kemampuan dan kemauan debitur untuk melunasi kreditnya, baik dari sumber pelunasan primer maupun sekunder.<sup>44</sup>

Untuk memperoleh kepercayaan kepada calon debitur, umumnya perbankan menggunakan instrument analisa kredit yang terkenal dengan nama azas "*the five of credit*", yaitu :

- a. *Character* (karakter).
- b. *Capacity* (kemampuan).
- c. *Capital* (Modal).
- d. *Collateral* (Jaminan).
- e. *Condition of Economy* (kondisi ekonomi).

Oleh Henderson dan Maness menjelaskan secara singkat konsep "5 C" tersebut adalah :

- a. *Character* (watak).

Adalah adanya keyakinan dari pihak bank bahwa calon debitur

---

<sup>44</sup> Halle, *Credit Analysis A Complete Guide*, (New York : Jhon Wiley and Sons Inc 1983), hal 54.

mempunyai moral, watak ataupun sifat yang dapat dipercaya, hal ini tercermin dari latar belakang debitur, baik yang bersifat latar belakang pekerjaan maupun yang bersifat pribadi seperti cara hidup atau gaya hidup yang dianut dalam keluarga. Oleh karena itu petugas bank mengadakan penyelidikan secara mendalam dengan jalan mencari informasi dari orang-orang yang berada dalam lingkungan pergaulannya dan hal tersebut akan sangat berpengaruh pada pelunasan kreditnya.

b. *Capacity* (kemampuan)

Merupakan gambaran mengenai kemampuan calon debitur untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya, kemampuan debitur untuk mencari dan mengkombinasikan *resources* yang terkait dengan bidang usaha, kemampuan memproduksi barang dan jasa yang dapat memenuhi tuntutan kebutuhan konsumen/pasar. Disamping itu juga kemampuan untuk mengantisipasi variabel dari *cashflow* usaha, sehingga *cashflow* tersebut dapat menjadi sumber pelunasan kredit yang utama sesuai dengan jadwal yang sudah disetujui bersama.

c. *Capital* (modal)

Penilaian pada aspek ini diarahkan pada kondisi keuangan nasabah, yang terdiri dari aktiva lancar (*current assets*) yang tertanam dalam bisnis dikurangi dengan kewajiban lancar (*current liabilities*) yang disebut dengan modal kerja (*working capital*); dan modal yang

tertanam pada aktiva jangka panjang dan aktiva lain-lain. Analisis *capital* itu dimaksudkan untuk menggambarkan struktur modal (*capital structure*) debitur, sehingga bank dapat melihat modal debitur sendiri yang tertanam pada bisnisnya dan berapa jumlah yang berasal dari pihak lain (kreditur dan *supplier*). Bank harus mengetahui “*debt to equity ratio*”, yaitu berapa besarnya seluruh hutang debitur dibandingkan dengan seluruh modal dan cadangan perusahaan serta likuiditas perusahaan.

d. *Collateral* (jaminan)

*Collateral* adalah jaminan kredit yang mempertinggi tingkat keyakinan bank bahwa debitur dengan bisnisnya mampu melunasi kredit, dimana agunan ini berupa jaminan pokok maupun jaminan tambahan yang berfungsi untuk menjamin pelunasan utang jika ternyata dikemudian hari debitur tidak melunasi utangnya. Debitur menjanjikan akan menyerahkan sejumlah hartanya untuk pelunasan utang menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, apabila dalam waktu yang ditentukan terjadi kemacetan pembayaran utangnya. Jaminan tambahan ini dapat berupa kekayaan milik debitur atau pihak ketiga.

e. *Condition of economy* (kondisi ekonomi)

Kondisi yang mempersyaratkan bahwa kegiatan usaha debitur mampumengikuti fluktuasi ekonomi, baik dalam negeri maupun luar

negeri, dan usaha masih mempunyai prospek kedepan selama kredit masih dinikmati debitur. Termasuk juga analisis terhadap kemampuan usaha debitur dalam menghadapi situasi perekonomian yang mungkin tiba-tiba berubah diluar dugaan semula.<sup>45</sup>

## **2. Perjanjian Kredit**

Pengertian ataupun rumusan perjanjian kredit tidak diatur secara khusus dalam Undang-undang Perbankan No.10 Tahun 1998, maupun dalam KUH Perdata. Oleh karena itu untuk memahami pengertian perjanjian kredit perlu dikemukakan pendapat para sarjana.

Beberapa sarjana hukum, seperti Subekti berpendapat bahwa “dalam bentuk apapun juga pemberian kredit itu diadakan, dalam semuanya itu pada hakekatnya yang terjadi adalah suatu perjanjian pinjam-meminjam sebagaimana diatur dalam Pasal 1754 sampai dengan Pasal 1769 KUH Perdata.”<sup>46</sup>

Pendapat senada juga dikemukakan oleh Marhainis Abdul Hay bahwa, “perjanjian kredit adalah identik dengan perjanjian pinjam meminjam dan tunduk kepada ketentuan Bab XIII dari Buku III KUH

---

<sup>45</sup> Henderson dan Maness, *The Financial Analysis Desk Book : A CashFlow Approach to Liquidity*, (New York: Van Nostrand Reinhold, 1989), hal 67.

<sup>46</sup> Subekti, *Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, (Bandung: PT. Cipta Aditya Bakti, 1991), hal 3.

Perdata.”<sup>47</sup>

Hal yang sama dikemukakan pula oleh Badruzaman bahwa: “dari rumusan yang terdapat di dalam Undang-undang perbankan mengenai perjanjian kredit, dapat disimpulkan bahwa dasar perjanjian kredit adalah perjanjian pinjam-meminjam di dalam KUH Perdata Pasal 1754.”<sup>48</sup>

Rumusan perjanjian pinjam-meminjam menurut pasal 1754 KUH Perdata, adalah :

“Perjanjian pinjam meminjam adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah uang yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.”

Adapun sarjana lainnya, seperti Hasan berpendapat lain, bahwa perjanjian kredit tidak tepat dikuasai oleh ketentuan Bab XIII Buku III KUH Perdata, sebab antara perjanjian pinjam-meminjam dengan perjanjian kredit terdapat beberapa perbedaan. Perbedaannya, menurut Hasan terdapat pada hal-hal :

- a. Perjanjian kredit selalu bertujuan dan tujuan tersebut biasanya berkaitan dengan program pembangunan; biasanya dalam perjanjian

---

<sup>47</sup>Marhainis Abdul Hay, *Hukum Perbankan Indonesia*, (Bandung : PT. Pradnya Paramita, 1975), hal 67.

<sup>48</sup>Mariam Darus Badrullzaman, *Perjanjian Kredit Bank*, (Bandung: Alumni, 1994), hal 110.

kredit sudah ditentukan tujuan penggunaan uang yang akan diterima, sedangkan dalam perjanjian pinjam-meminjam tidak ada ketentuan tersebut dan debitur dapat menggunakan uang secara bebas.

- b. Dalam perjanjian kredit sudah ditentukan bahwa pemberi kredit adalah bank atau lembaga pembiayaan, dan tidak dimungkinkan diberikan oleh individu, sedangkan dalam perjanjian pinjam-meminjam, pemberi pinjaman dapat dilakukan oleh individu.
- c. Pengaturan yang berlaku bagi perjanjian kredit berbeda dengan perjanjian pinjam-meminjam. Pada perjanjian kredit berlaku ketentuan UUD 1945, ketentuan bidang ekonomi dalam GBHN, ketentuan-ketentuan umum KUH Perdata, UU Perbankan, Paket Kebijakan Pemerintah dalam Bidang Ekonomi terutama bidang perbankan, Surat-Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) dan sebagainya, sedangkan pada perjanjian pinjam-meminjam tunduk semata-mata pada KUH Perdata Bab XIII Buku III.
- d. Pada perjanjian kredit dan atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah telah ditentukan bahwa pengembalian uang pinjaman itu harus disertai bunga, imbalan, atau pembagian hasil, sedangkan dalam perjanjian pinjam-meminjam hanya berupa bunga saja, dan bunga inipun baru ada apabila diperjanjikan. Pada perjanjian kredit, bank harus mempunyai keyakinan akan kemampuan debitur akan pengembalian kredit yang diformulasikan dalam bentuk jaminan baik



materiil maupun immateriil, sedangkan pada perjanjian pinjam-meminjam, jaminan merupakan pengaman bagi kepastian pelunasan hutang dan ini pun baru ada apabila diperjanjikan, dan jaminan itu hanya merupakan jaminan secara fisik atau materiil saja.<sup>49</sup>

Senada dengan pendapat dari Hasan diatas, Ibrahim juga berpendapat bahwa “perjanjian kredit berbeda dengan penjanjian pinjam-meminjam yang diatur dalam Bab XIII Buku III KUH Perdata, baik dari pengertian, subjek pemberi kredit, pengaturan, tujuan dan jaminannya.<sup>50</sup>” Akan tetapi dengan perbedaan tersebut tidaklah berarti dapat dilepaskan sama sekali dari akarnya yaitu perjanjian pinjam-meminjam, karena perjanjian kredit merupakan modifikasi sedemikian rupa sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan dunia bisnis saat ini.

Perjanjian kredit bank dilaksanakan berdasarkan atas kesepakatan diantara kedua belah pihak yaitu pihak bank sebagai kreditur dan pihak nasabah sebagai debitur, yang dilandasi dengan kepercayaan, terutama kepercayaan dari pihak bank sebagai pemberi kredit kepada debiturnya.

Menurut Halle mengemukakan, terjadinya perjanjian kredit harus memenuhi kriteria sebagai berikut :

---

<sup>49</sup> Djuhaendah Hasan, *Lembaga Jaminan Kebendaan Bagi Tanah dan Benda Liannya yang Melekat Pada Tanah Dalam Konsepsi Dalam Pemisahan Asas Horisonta*, (Bandung; PT. Citra Aditya Bakti, 1996), hal 176.

<sup>50</sup> Ibrahim, *Cross Default Dan Cross Collateral Sebagai Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2004), hal 28.

- 1) Terdapat kedua belah pihak serta ada persetujuan pinjam meminjam antar kreditur dan debitur.
- 2) Mempunyai jangka waktu tertentu.
- 3) Hak kreditur untuk menuntut dan memperoleh pembayaran serta kewajiban debitur untuk membayar prestasi yang diterima.<sup>51</sup>

Perjanjian kredit adalah suatu perjanjian pokok yang bersifat riil artinya terjadinya perjanjian kredit ditentukan oleh penyerahan uang oleh bank kepada nasabah debitur. Perjanjian kredit harus diikuti dengan penyerahan uang secara riil kepada debitur. Dalam praktek, ada kemungkinan pinjaman yang diperjanjikan dalam perjanjian kredit tidak jadi dicairkan. Ini terjadi jika bank mendapat informasi baru yang tidak menguntungkan tentang debitur. Ada juga kemungkinan bahwa besarnya jumlah yang diserahkan berlainan dengan jumlah yang semula disetujui di dalam perjanjian kredit.

Penyerahan uang kepada penerima kredit bergantung pula pada sifat atau jenis kredit yang diperjanjikan. Jika kredit itu dalam bentuk investasi, maka pencairannya dilakukan berdasarkan *progress* fisik proyek yang dibiayai. Jika pinjaman dalam bentuk rekening koran, maka pencairannya dilakukan dalam bentuk plafond ke dalam rekening koran, penarikan oleh debitur tergantung kebutuhannya tetapi dalam limit plafond

---

<sup>51</sup> Halle, *Op,Cit.*, hal 53.

yang disediakan.

Dilihat dari bentuknya, perjanjian kredit perbankan pada umumnya menggunakan bentuk perjanjian baku (*standard contract*). Artinya, perjanjiannya telah disediakan oleh bank dalam bentuk blanko, sedangkan debiturnya tinggal mempelajari dan memahaminya dengan baik. Kelemahan dari perjanjian ini, jika dilihat dari sudut debitur, adalah debitur tinggal memiliki salah satu pilihan dari dua pilihan yakni menerima atau menolak, tanpa adanya kemungkinan melakukan negosiasi atau tawar menawar dengan bank. Dalam hal ini debitur tidak dapat berbuat banyak dalam menghadapi kreditur karena perjanjian baku telah ditentukan oleh bank.

Keberadaan perjanjian kredit sangat penting karena berfungsi sebagai dasar hubungan kontraktual antara para pihak. Dalam perjanjian kredit dapat ditelusuri berbagai hal tentang pemberian, pengelolaan ataupun penatalaksanaan kredit itu sendiri. Untuk itu sangat perlu untuk diperhatikan bersama.

Wardoyo dalam Hermansyah mengemukakan bahwa perjanjian kredit itu memiliki tiga fungsi, yaitu :

- a. Berfungsi sebagai perjanjian pokok, artinya perjanjian kredit merupakan sesuatu yang menentukan batal atau tidak batalnya perjanjian lain yang mengikutinya, misalnya perjanjian pengikatan jaminan;

- b. Berfungsi sebagai alat bukti mengenai batasan-batasan hak dan kewajiban diantara kreditur dan debitur;
- c. Berfungsi sebagai alat untuk melakukan monitoring kredit.<sup>52</sup>

### **3. Penanganan Kredit Bermasalah**

Membahas masalah kredit, tidak lepas dari pembicaraan mengenai kredit bermasalah (*non performing loan*). Kredit bermasalah selalu ada dalam kegiatan perkreditan bank, karena bank tidak mungkin menghindarkan adanya kredit bermasalah. Sepandai apapun para analis kredit dalam menganalisis permohonan kredit, tetap saja ada kemungkinan kredit tersebut bermasalah. Itulah sebabnya adalah hal yang wajar jika setiap bank memiliki kredit bermasalah. Tetapi sungguh pun demikian, tidak semua kredit bermasalah itu adalah kredit macet. Suatu kredit bermasalah yang tidak dikelola dengan baik akan mengakibatkan kemacetan kredit atau umum disebut sebagai kredit macet. Terjadinya kemacetan dalam pengembalian kredit mungkin saja disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian dari pihak bank sendiri atau dari pihak nasabah, ataupun oleh karena keadaan memaksa (*force majeure*). Bank hanya berusaha menekan seminimal mungkin besarnya kredit bermasalah agar tidak melebihi ketentuan Bank Indonesia sebagai pengawas perbankan.

Bank Indonesia melalui Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor

---

<sup>52</sup>Wardoyo dan Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, (Jakarta: PT. Kencana Prenada Media Group, 2006), hal 72.

7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum, membedakan kualitas kredit kedalam 5 (lima) kolektibilitas, yaitu :

- a. Lancar (L)
- b. Dalam Perhatian Khusus (DPK)
- c. Kurang Lancar (KL)
- d. Diragukan (D)
- e. Macet (M)

Kredit yang termasuk dalam golongan kolektibilitas lancar dan dalam perhatian khusus dinilai sebagai kredit yang tidak bermasalah (adalah *performing loan*), sedangkan kredit yang termasuk dalam golongan kurang lancar, diragukan dan macet dinilai sebagai kredit bermasalah (*non performing loan*). Beberapa indikator untuk penggolongan kelima kualitas kredit tersebut, adalah sebagaiberikut :

- a. Kredit digolongkan Lancar (L), yaitu jika memenuhi kriteria :
  - 1) pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga tepat waktu;
  - 2) memiliki mutasi rekening yang aktif; atau
  - 3) bagian kredit yang dijamin dengan agunan tunai,
- b. Kredit digolongkan Dalam Perhatian Khusus (DPK), yaitu jika memenuhi kriteria :
  - 1) terdapat tunggakan angsuran pembayaran pokok dan/atau bunga yang belum melampaui 90 hari; atau
  - 2) kadang-kadang terjadi cerukan; atau

- 3) mutasi rekening relatif rendah; atau
  - 4) jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan;  
atau
  - 5) didukung oleh pinjaman baru.
- c. Kredit digolongkan Kurang Lancar (KL), yaitu jika memenuhi kriteria:
- 1) terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 90 hari; atau
  - 2) sering terjadi cerukan; atau
  - 3) frekuensi mutasi relatif rendah; atau
  - 4) terjadi pelanggaran kontrak yang diperjanjikan lebih dari 90 hari;  
atau
  - 5) terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitur; atau
  - 6) dokumentasi pinjaman yang lemah.
- d. Kredit yang digolongkan Diragukan (D), yaitu jika memenuhi kriteria:
- 1) terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 180 hari; atau
  - 2) sering terjadi cerukan yang bersifat permanen; atau
  - 3) terjadi wanprestasi lebih dari 180 hari; atau
  - 4) terjadi kapitalisasi bunga; atau
  - 5) dokumentasi hukum yang lemah baik untuk perjanjian kredit maupun pengikatan jaminan.
- e. Kredit yang digolongkan Macet (M), yaitu jika memenuhi kriteria :

- 1) terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 270 hari; atau
- 2) kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru; atau
- 3) dari segi hukum maupun kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai wajar.

Penting untuk diperhatikan bahwa sebelum menurunkan kolektibilitas kredit, bank akan melakukan evaluasi yang mendalam terhadap debitur-debitur yang termasuk dalam kolektibilitas *non performing loan*. Ini penting karena penurunan kolektibilitas kredit akan mempengaruhi kinerja bank yang bersangkutan, karena penilaian sehat tidaknya suatu bank salah satunya ditentukan dari berapa besar *non performing loan* bank itu. Untuk itu setiap bank secara periodik selalu melakukan evaluasi debiturnya dengan menganalisa aspek-aspek :

- a. Prospek usaha
- b. Kondisi keuangan dengan penekanan *cash flow*.
- c. Kemampuan membayar.

Ketiga aspek tersebut merupakan satu kesatuan untuk menilai kualitas kredit, dan tidak dapat dinilai terpisah satu sama lainnya. Kredit bermasalah akan menjadi beban bank karena ia menjadi salah satu tolok ukur bagi Bank Indonesia untuk menilai kinerja bank itu sendiri. Untuk itu adanya kredit bermasalah, perlu penyelesaian yang cepat, tepat dan akurat, perlu dilakukan penilaian ulang secara periodik guna penentuan

langkah-langkah penyelamatan dan atau penyelesaian bagi bank.

Dalam hal terjadinya kredit bermasalah, bank akan melakukan tindakan-tindakan penyelamatan kredit. Tindakan penyelamatan kredit ini umumnya dilaksanakan dengan tiga *treatment*, yaitu : *Rescheduling*, *Reconditioning* dan *Restructuring*.

*Recheduling* adalah tindakan penyelamatan terhadap kredit bermasalah dengan jalan merubah jangka waktu kredit, misalnya dengan jalan memperpanjang jangka waktu kredit dan atau memperpanjang jangka waktu angsuran kredit. *Reconditioning* adalah tindakan penyelamatan kredit dengan jalan memberikan keringanan atas persyaratan-persyaratan kredit, misalnya dengan merekapitalisasi bunga tertunggak, penundaan pembayaran bunga sampai pada waktu tertentu (*grace period*), penurunan suku bunga, pembebasan bunga ataupun pengkonversian kredit dengan jangka waktu pendek menjadi jangka waktu panjang. Sedangkan *restructuring* adalah tindakan penyelamatan kredit dengan melakukan perubahan struktur kredit setelah lebih dahulu melakukan analisa atas keadaan permodalan debitur. Tindakan-tindakannya dapat berupa penambahan jumlah kredit (*injection*) dan atau merubah struktur kredit misalnya dari kredit modal kerja menjadi kredit angsuran.

Apabila upaya-upaya penyelamatan kredit seperti telah dikemukakan diatas tidak berhasil, maka penanganan atau upaya



penagihan kredit yang terakhir adalah dengan melihat jaminan sebagai *second way-out (second source of repayment)*. Dalam hal ini akan dilakukan upaya hukum eksekusi atas jaminan, yang tindakan hukumnya tergantung daripada jenis dan macam jaminan yang diserahkan oleh debitur atau penjaminnya. Prakteknya, eksekusi atas jaminan dijadikan upaya bank yang paling akhir dilakukan, hanya apabila upaya-upaya penyelamatan kredit tidak berhasil.

## **C. Tinjauan Umum Tentang Pembiayaan Konsumen**

### **1. Pengertian Pembiayaan Konsumen**

Pembiayaan konsumen merupakan salah satu model pembiayaan yang dilakukan oleh perusahaan *Finance*, di samping kegiatan leasing, factoring, kartu kredit dan sebagainya. Target pasar dari pembiayaan konsumen ini sudah jelas, yaitu para konsumen. Suatu istilah yang dipakai sebagai lawan dari kata produsen.

Pranata hukum “Pembiayaan Konsumen” dipakai sebagai terjemahan dari istilah “*Consumer Finance*”. Pembiayaan konsumen ini tidak lain dari sejenis kredit konsumsi (*Consumer Credit*). Hanya saja jika kredit konsumsi diberikan oleh bank sementara pembiayaan konsumen dilakukan oleh perusahaan pembiayaan.

Menurut A. Abdurrahman, pengertian kredit konsumsi sebenarnya secara substansif sama saja dengan pembiayaan konsumen, yaitu :

“Kredit yang diberikan kepada konsumen-konsumen guna pembelian barang konsumsi dan jasa-jasa seperti yang dibedakan dari pinjaman-pinjaman yang digunakan untuk tujuan-tujuan produktif atau dagang. Kredit yang demikian itu dapat mengandung resiko yang lebih besar dari pada kredit dagang biasa maka dari itu, biasanya kredit itu diberikan dengan tingkat bunga yang lebih tinggi”.<sup>53</sup>

Keputusan Menkeu No. 1251/KMK.013/1988 memberikan pengertian kepada pembiayaan konsumen sebagai suatu kegiatan yang dilakukan dalam bentuk penyediaan dana bagi konsumen untuk pembelian barang yang pembayarannya dilakukan secara angsuran atau berkala oleh konsumen.

Berdasarkan definisi-definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa sebenarnya antara kredit konsumsi dengan pembiayaan konsumen sama saja. Hanya pihak pemberi kreditnya yang berbeda. Kredit konsumsi pemberi kreditnya adalah pihak bank, sementara pembiayaan konsumen oleh perusahaan pembiayaan.

## **2. Pentingnya Jaminan Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen**

Mengingat bahwa perjanjian pembiayaan konsumen merupakan perjanjian kredit yang memerlukan sejumlah uang dan kemungkinan terjadinya kelalaian oleh pihak konsumen nakal untuk menjamin kelancaran dan ketertiban pembayaran angsuran serta mencegah

---

<sup>53</sup> A. Abdurrahman, *Ensiklopedi Ekonomi Keuangan Perdagangan*, (Jakarta : Pradnya Paramita, 1999), hal 242.

timbulnya kerugian bagi perusahaan pembiayaan, maka perlu adanya jaminan-jaminan.

Jaminan-jaminan yang diberikan dalam transaksi pembiayaan konsumen ini pada prinsipnya serupa dengan jaminan terhadap perjanjian kredit bank biasa, khususnya kredit konsumsi, jaminan dalam perjanjian pembiayaan di bagi dalam tiga kelompok yaitu :

a. Jaminan Utama

Sebagai suatu kredit, maka jaminan pokoknya adalah kepercayaan dari kreditur kepada konsumen bahwa pihak konsumen dapat dipercaya dan sanggup membayar hutang-hutangnya. Disini prinsip pemberian kredit berlaku, yaitu : Prinsip 5C (*Collateral, Capacity, Character, Capital dan Condition of economy*).

b. Jaminan Pokok

Sebagai jaminan pokok terhadap transaksi pembiayaan konsumen adalah barang yang dibeli dengan dana tersebut. Biasanya jaminan tersebut dibuat dalam bentuk *Fiduciary Tranfery of Ownership* (Fidusia). Karena adanya fidusia tesebut, maka biasanya seluruh dokumen yang berkenaan dengan kepemilikan barang yang bersangkutan akan dipegang oleh pihak pemberi biaya hingga kredit lunas.

c. Jaminan Tambahan

Di samping itu sering juga diminta jaminan tambahan terhadap transaksi pembiayaan konsumen ini, biasanya jaminan tambahan tersebut berupa pengakuan hutang (*promissory notes*), kuasa menjual barang dan (*cessie*) dari asuransi, juga jaminan berupa persetujuan suami/istri untuk konsumen pribadi dan persetujuan komisaris/RUPS untuk konsumen perusahaan, sesuai ketentuan anggaran dasarnya.

### **3. Hubungan Para Pihak Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen**

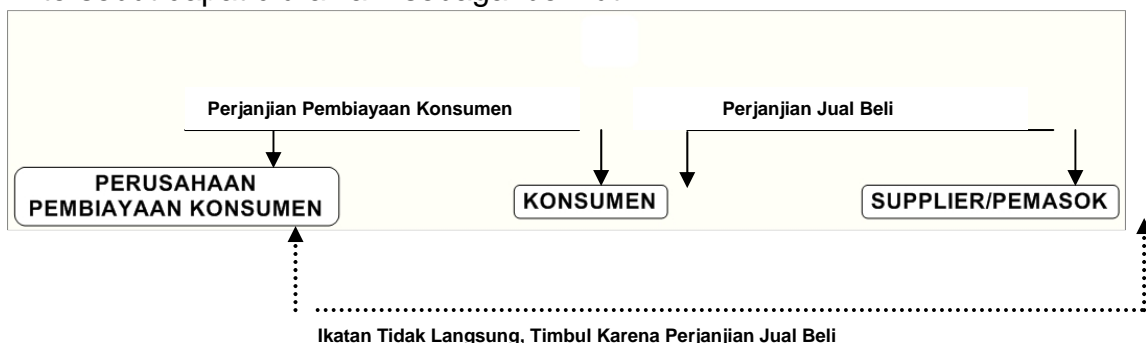
Pembiayaan konsumen merupakan lembaga pembiayaan yang kegiatannya berupa penyediaan dana oleh perusahaan pembiayaan konsumen kepada konsumen untuk pembelian suatu barang dari pemasok (*Supplier*), yang pembayarannya dilakukan secara berkala (*angsuran*) oleh Konsumen. Dengan demikian, dalam transaksi pembiayaan konsumen, ada tiga pihak yang terlibat dalam hubungan hukum pembiayaan konsumen, yaitu perusahaan pembiayaan konsumen, konsumen, dan pemasok (*Supplier*).

Perusahaan pembiayaan konsumen adalah badan usaha yang melakukan pembiayaan pengadaan barang untuk kebutuhan konsumen dengan sistem pembayaran angsuran berkala. Perusahaan pembiayaan konsumen ini sesuai dengan Keppres No. 61 Tahun 1998 harus berbentuk badan hukum, yaitu Perseroan Terbatas atau Koperasi. Dalam transaksi pembiayaan konsumen, perusahaan pembiayaan konsumen

berkedudukan sebagai kreditor, yaitu pihak pemberi biaya kepada konsumen.

Konsumen adalah pembeli barang yang dananya dibiayai oleh perusahaan pembiayaan konsumen. Dalam keppres No. 61 Tahun 1988 tidak ditentukan tentang status konsumen. Dengan demikian, konsumen tersebut dapat berstatus perseorangan dapat juga berstatus badan usaha. Dalam transaksi pembiayaan konsumen, konsumen ini berkedudukan sebagai debitur, yaitu pihak penerima biaya dari perusahaan pembiayaan konsumen.

Pemasok (*supplier*) adalah penjual, yaitu perusahaan atau pihak-pihak yang menjual atau menyediakan barang-barang yang dibutuhkan konsumen dalam rangka pembiayaan konsumen. Barang-barang yang dijual atau disediakan oleh pemasok (*supplier*) merupakan barang-barang konsumsi, seperti kendaraan bermotor, barang-barang elektronik, komputer, kebutuhan rumah tangga, dan sebagainya. Pembayaran atas harga barang-barang yang dibutuhkan konsumen tersebut dilakukan oleh perusahaan pembiayaan konsumen kepada pemasok (*supplier*). Selanjutnya, hubungan antara pihak-pihak dalam pembiayaan konsumen tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:



- a. Hubungan antara Perusahaan Pembiayaan Konsumen dan Konsumen.

Terjadinya hubungan antara perusahaan pembiayaan konsumen dan konsumen karena sebelumnya telah terlebih dahulu dilakukan kontrak, yaitu kontrak pembiayaan konsumen. Atas dasar kontrak yang sudah mereka tanda tangani, secara yuridis para pihak terkait akan hak dan kewajiban masing-masing. Konsekuensi yuridis selanjutnya adalah kontrak tersebut harus dilaksanakan dengan iktikad baik (*in good faith*) dan tidak dapat dibatalkan secara sepihak (*unilateral unavoidable*).

Kewajiban perusahaan pembiayaan konsumen adalah menyediakan dana (kredit) kepada konsumen sejumlah uang yang dibayarkan secara tunai kepada konsumen sejumlah uang yang dibayarkan secara tunai kepada pemasok atas pembelian barang yang dibutuhkan konsumen. Adapun kewajiban konsumen adalah membayar kembali dana (kredit) secara berkala (angsuran) sampai lunas kepada perusahaan pembiayaan

konsemen. Apabila dana (kredit) sudah dicairkan dan barang sudah diserahkan oleh pemasok kepada konsumen, maka barang tersebut menjadi milik konsumen. Akan tetapi, jika sampai angsuran terakhir belum dibayar lunas, maka barang tersebut menjadi jaminan utang secara fidusia. Jadi, hubungan kontraktual antara perusahaan pembiayaan konsumen dengan konsumen sejenis dengan perjanjian kredit pada umumnya. Dengan demikian ketentuan-ketentuan tentang perjanjian kredit dalam KUHPerdara berlaku sepanjang tidak ditentukan lain.

Adapun hak perusahaan pembiayaan konsumen adalah menerima pembayaran kembali dana (kredit) secara berkala (angsuran) samapai lunas dari konsumen. Hak konsumen adalah menerima pembiayaan dalam bentuk dana (kredit) sejumlah uang yang dibayarkan secara tunai kepada pemasok (*supplier*) untuk pembelian barang yang dibutuhkan konsumen.

*b. Hubungan antara Perusahaan Pembiayaan Konsumen dan Pemasok (Supplier)*

Berbeda dengan hubungan antara perusahaan pembiayaan konsumen dan konsumen di mana terjadi hubungan kontraktual, di dalam hubungan antara perusahaan pembiayaan konsumen dan pemasok tidak ada hubungan kontraktual. Antara perusahaan pembiayaan konsemen dan pemasok tidak ada hubungan hukum yang khusus, kecuali hanya perusahaan pembiayaan konsumen sebagai pihak ketiga yang

disyaratkan. Maksud persyaratan tersebut adalah pembayaran atas barang-barang yang dibeli dari pemasok akan dilakukan oleh pihak ketiga, yaitu perusahaan pembiayaan konsumen.

Berkaitan dengan persyaratan tersebut apabila perusahaan pembiayaan konsumen melakukan wanprestasi, sementara kontrak jual beli dan kontrak pembiayaan konsumen telah selesai dilakukan, maka jual beli bersyarat yang terjadi antara pemasok dan konsumen tersebut dapat dibatalkan oleh pemasok. Selanjutnya, konsumen dapat mengugat perusahaan pembiayaan konsumen karena telah melakukan wanprestasi.

c. Hubungan antara Konsumen dan Supplier.

Konsumen untuk mendapatkan barang yang dibutuhkan akan menghubungi perusahaan pembiayaan konsumen guna memperoleh pembiayaan berupa dana (kredit) dan menghubungi pemasok (*supplier*) sebagai penjual atau penyedia barang. Dengan demikian, dalam transaksi pembiayaan konsumen ada 2 (dua) hubungan kontraktual, yaitu

- 1) Perjanjian pembiayaan konsumen antara perusahaan pembiayaan konsumen dan konsumen;
- 2) Perjanjian jual beli antara pemasok (*supplier*) dan konsumen

Uraian tentang perjanjian pembiayaan konsumen antara perusahaan pembiayaan konsumen dan konsumen sudah dibahas diatas. Adapun hubungan antara konsumen dan pemasok (*supplier*) terjadi karena adanya perjanjian jual beli, dalam hal ini perjanjian jual beli bersyarat.



Dalam perjanjian jual beli bersyarat bahwa pembayaran atas harga barang akan dilakukan oleh pihak ketiga, yaitu perusahaan pembiayaan konsumen. Dengan demikian, apabila karena alasan apa pun pihak ketiga, dalam hal ini perusahaan pembiayaan konsumen melakukan wanprestasi, yaitu tidak melakukan pembayaran secara tunai kepada pemasok (*supplier*), maka jual beli antara pemasok (*supplier*) dan konsumen akan dibatalkan (*voidable*).

Karena hubungan antara pemasok (*supplier*) dan konsumen terjadi atas dasar perbuatan jual beli, maka semua ketentuan tentang jual beli berlaku dalam pembiayaan konsumen sepanjang relevan dan/atau tidak ditentukan lain. Ketentuan-ketentuan dimaksud misalnya tentang ketentuan kewajiban menanggung dari pihak pemasok (*supplier*) bahwa barang tidak ada cacat tersembunyi, dan kewajiban layanan purnajual (*after sale service*).

## **D. Tinjauan Tentang Eksekusi**

### **1. Pengertian Eksekusi**

Eksekusi dalam bahasa Belanda disebut Executie atau Uitvoering, dalam kamus hukum diartikan sebagai Pelaksanaan Putusan Pengadilan.

Dalam Pasal 29 Undang-undang Nomor 42 tahun 1999, Eksekusi, adalah Pelaksanaan titel eksekutorial oleh Penerima Fidusia, berarti eksekusi langsung dapat dilaksanakan tanpa melalui pengadilan dan

bersifat final serta mengikat para pihak untuk melaksanakan putusan tersebut.

Menurut R. Subekti, Eksekusi adalah Upaya dari pihak yang dimenangkan dalam putusan guna mendapatkan yang menjadi haknya dengan bantuan kekuatan hukum, memaksa pihak yang dikalahkan untuk melaksanakan putusan<sup>54</sup>, lebih lanjut dikemukakannya bahwa pengertian Eksekusi atau pelaksanaan putusan, mengandung arti, bahwa pihak yang dikalahkan tidak mau melaksanakan putusan tersebut secara sukarela, sehingga putusan itu harus dipaksakan padanya dengan bantuan dengan kekuatan hukum. Dengan kekuatan hukum ini dimaksudkan pada polisi, kalau perlu polisi militer (Angkatan bersenjata)<sup>55</sup>.

Pendapat yang sama dikemukakan oleh Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata yang menyatakan, bahwa Eksekusi adalah Tindakan paksaan oleh Pengadilan terhadap pihak yang kalah dan tidak mau melaksanakan putusan dengan sukarela<sup>56</sup>.

Sejalan dengan kedua pendapat tersebut di atas, dapat dilihat pendapat dari Sudikno Mertokusumo, yang menyatakan pelaksanaan putusan / Eksekusi ialah Realisasi dari kewajiban pihak yang

---

<sup>54</sup>Subekti, *Hukum Acara Perdata*, (Bandung : PT. Bina Cipta 1989), hal.128.

<sup>55</sup>*Ibid*, hal 130.

<sup>56</sup>Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, (Bandung : PT. Mandar Maju 1997), hal 10.

bersangkutan untuk memenuhi prestasi yang tercantum dalam dalam putusan tersebut<sup>57</sup>.

Masih Sejalan dengan pendapat tersebut adalah pendapat M Yahya Harahap yang menyatakan bahwa :

“Eksekusi adalah sebagai tindakan hukum yang dilakukan oleh pengadilan kepada pihak yang kalah dalam suatu perkara merupakan aturan dan tata cara lanjutan dari proses pemeriksaan perkara. Oleh karena itu, Eksekusi tiada lain dari pada tindakan yang berkesinambungan dari seluruh proses hukum acara perdata . Eksekusi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan tata tertib beracara yang terkandung dalam HIR/Rbg”<sup>58</sup>.

Jika bertitik tolak pada ketentuan Bab kesepuluh bagian V HIR dan title keempat Rbg, Pengertian Eksekusi, sama dengan pengertian menjalankan putusan pengadilan tidak lain dari melaksanakan isi putusan pengadilan yakni melaksanakan secara paksa putusan pengadilan dengan bantuan kekuatan umum bila pihak yang kalah (Pihak tereksekusi/pihak tergugat) tidak mau menjalankan secara sukarela<sup>59</sup>.

Hukum Eksekusi menurut R. Soepomo, adalah hukum yang mengatur cara dan syarat yang dipakai oleh alat-alat Negara guna membantu pihak-pihak yang berkepentingan untuk menjalankan

---

<sup>57</sup>Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Jogyakarta : Liberty 1989), hal 206.

<sup>58</sup>M.Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, (Jakarta : PT. Gramedia 1991), hal 1.

<sup>59</sup> M.Yahya Harahap , *Ibid*, hal 5.

keputusan Hakim apabila pihak yang kalah tidak bersedia memenuhi bunyi putusan dalam waktu yang telah ditentukan<sup>60</sup>.

Sedangkan Hukum Eksekusi menurut Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, adalah Hukum yang mengatur tentang pelaksanaan hak-hak kreditur dalam perutangan yang tertuju terhadap harta kekayaan debitur, manakala perutangan itu tidak dipenuhi secara sukarela oleh Debitur<sup>61</sup>.

Hukum Eksekusi ini sebenarnya tidak diperlukan apabila yang dikalahkan dengan sukarela mentaati bunyi putusan. Akan tetapi dalam kenyataan tidak semua pihak mentaati bunyi putusan dengan sepenuhnya. Oleh karena itu diperlukan suatu aturan bila putusan itu tidak ditaati dan bagaimana tata cara pelaksanaannya<sup>62</sup>.

Bila kita melihat pengertian eksekusi menurut para sarjana diatas, tampak bahwa pengertian eksekusi terbatas pada Eksekusi oleh Pengadilan (putusan hakim), padahal yang juga dapat dieksekusi menurut hukum acara perdata yang berlaku HIR dan Rbg yang juga dapat dieksekusi adalah salinan / grosse Akta yang memuat irah-irah “ Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang maha Esa” yang berisi kewajiban untuk membayar sejumlah uang.

---

<sup>60</sup> R.Soepomo, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, 1989, (Jakarta : PT. Pradnya Paramita,)), hal 119.

<sup>61</sup> Sri Soedewi, *Op.Cit*, Hal.31

<sup>62</sup> Aten Affandi, Wahyu Affandi, *Tentang melaksanakan Putusan Hakim Perdata*, (Bandung : Alumni 1983), hal 32.

Lebih lanjut dapat dilihat pendapat Bachtiar Sibarani, yang menyatakan bahwa Eksekusi adalah pelaksanaan secara paksa putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap / pelaksanaan secara paksa dokumen perjanjian yang dipersamakan dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap<sup>63</sup>.

Pendapat mengenai pengertian Eksekusi yang lebih luas juga dikemukakan oleh Mochammad Dja'is bahwa :

“Eksekusi adalah Upaya kreditur merealisasi hak secara paksa karena debitur tidak mau secara sukarela memenuhi kewajibannya. Dengan demikian eksekusi merupakan bagian dari proses penyelesaian sengketa hukum. Menurut pandangan hukum Eksekusi obyek Eksekusi tidak hanya putusan hakim dan Grosse Akta”<sup>64</sup>

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan, bahwa pengertian Eksekusi dalam perkara perdata adalah upaya kreditur untuk merealisasikan haknya secara paksa jika debitur tidak secara sukarela memenuhi kewajibannya yang tidak hanya putusan hakim, tetapi pelaksanaan Grosse Akta serta pelaksanaan putusan dari institusi yang berwenang atau bahkan Kreditur secara langsung.

---

<sup>63</sup> Bachtiar Sibarani, *Haircut atau Pareta Eksekusi*, 2001, Jurnal Hukum Bisnis, hal 6.

<sup>64</sup> Mochammad Dja'is, *Hukum Eksekusi Sebagai wacana baru dibidang hukum*, disampaikan dalam rangka Dies Natalis Ke-43, Fakultas Hukum, 2000 Undip, hal.7

## **2. Jenis-jenis Eksekusi**

Menurut Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, Pembagian jenis Eksekusi meliputi :

- a. Eksekusi Pasal 196 HIR, yaitu Eksekusi pembayaran sejumlah uang.
- b. Eksekusi yang diatur dalam Pasal 225 HIR, yaitu menghukum seorang melakukan sesuatu perbuatan.
- c. Eksekusi Riil yang dalam praktek banyak dilakukan tetapi tidak diatur dalam HIR<sup>65</sup>.

Berdasarkan obyeknya, Eksekusi dibedakan menjadi :

- a. Eksekusi Putusan Hakim.
- b. Eksekusi Benda Jaminan.
- c. Eksekusi Grosse Akta.
- d. Eksekusi terhadap sesuatu yang mengganggu hak dan kewajiban.
- e. Eksekusi Surat Peryataan bersama.
- f. Eksekusi Surat Paksa.

Berdasarkan Prosedurnya, dapat dibedakan menjadi :

- a. Eksekusi Putusan Hakim yang menghukum pihak yang dikalahkan untuk membayar sejumlah uang.
- b. Eksekusi Riil, dibedakan menjadi :

---

<sup>65</sup> Retnowulan, *Op.Cit*, hal 130.

- 1) Eksekusi Riil terhadap putusan hakim untuk mengosongkan suatu benda tetap dan menyerahkan kepada yang berhak.
  - 2) Eksekusi Riil terhadap obyek lelang.
  - 3) Eksekusi Riil berdasarkan Undang-undang, diatur dalam pasal 666 KUHperdata.
  - 4) Eksekusi Riil berdasarkan perjanjian (Perjanjian sengan kuasa dan perjanjian dengan penegasan terhadap piutang sebagai jaminan dan benda miliknya sendiri.
- c. Eksekusi Eksekusi putusan yang menghukum orang untuk melakukan perbuatan, mengingat dalam perkara perdata tidak boleh dilakukan siksaan badan maka eksekusi ini perbuatan yang harus dilakukan dapat dinilai dengan sejumlah uang.
- d. Eksekusi dengan pertolongan hakim, yaitu eksekusi atas Grosse Akta.
- e. Pareta Eksekusi atau Eksekusi langsung.
- f. Eksekusi dengan penjualan dibawah tangan, yang dimaksud disini adalah Eksekusi dilakukan dengan penjualan dibawah tangan sebagaimana telah diperjanjikan sebelumnya.
- g. Penjualan di pasar atau bursa. Dalam hal obyek jaminan gadai atau fidusia adalah barang perdagangan atau efek yang dapat diperdagangkan atau dijual dipasar atau bursa, maka jika debitor wanprestasi pihak kreditor pemegang gadai fidusia dapat menjual

obyek jaminan gadai atau fidusia dipasar bursa Pasal 1155 (2) KUHPerdara, Pasal 31 UUJF.

- h. Eksekusi berdasarkan ijin hakim. Dalam hal debitor wanprestasi, pemegang gadai dapat mengajukan permohonan kepada hakim untuk menentukan cara penjualan obyek gadai atau menentukan suatu jumlah uang tertentu sebagai harga barang yang harus dibayar oleh penerima gadai kepada pemberi gadai, selanjutnya obyek gadai pemberi gadai, selanjutnya obyek gadai menjadi milik penerima gadai Pasal 1156 KUHPerdara.

Putusan Pengadilan Negeri baru dapat dilaksanakan jika putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap artinya baik penggugat maupun tergugat telah menerima putusan yang dijatuhkan.

Sudikno Mertokusumo juga mengemukakan jenis-jenis Eksekusi sebagai berikut :

- a. Eksekusi Putusan yang menghukum untuk membayar sejumlah uang, diatur dalam Pasal 196 HIR/Pasal 208 Rbg
- b. Eksekusi Putusan yang menghukum orang untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan diatur dalam Pasal 225HIR/Pasal 259 Rbg.
- c. Eksekusi Riil, Yaitu pelaksanaan putusan hakim yang memerintahkan pengosongan benda tetap, diatur dalam Pasal 1033



RV, HIR hanya mengenal Eksekusi Riil dalam penjualan lelang, diatur dalam Pasal 200 HIR/Pasal Rbg.<sup>66</sup>

---

<sup>66</sup> Sudikno Mertokusumo, *Op.Cit*, hal 210.

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Eksekusi obyek jaminan fidusia yang dilakukan oleh PT. Adira Finance Kota Makassar**

###### **1. Pengambilan kembali barang jaminan**

Menurut Raymond Felix, Branch Manager PT. Adira Finance, perlu diluruskan terlebih dahulu mengenai istilah “eksekusi” dalam hal terjadinya kemacetan kredit pembayaran angsuran oleh penerima fasilitas yang dalam praktek di lapangan lebih dikenal dengan sebutan “penarikan”. Menurut Hasil Penelitian Penulis di lapangan dalam hal ini memakai istilah “penarikan” adalah tidak tepat, karena yang dilakukan oleh PT. Adira Finance sebagai pemberi fasilitas adalah mengambil kembali barang jaminan sesuai dengan klausul perjanjian yang sudah disepakati sebelumnya yang diatur dalam Pasal 4 (Perjanjian Pembiayaan Konsumen) tentang Hak dan Kewajiban atas Barang Jaminan<sup>67</sup>.

Eksekusi menurut Pasal 29 Undang-undang Nomor 42 tahun 1999, eksekusi adalah pelaksanaan titel eksekutorial oleh Penerima Fidusia, berarti eksekusi langsung dapat dilaksanakan tanpa melalui

---

<sup>67</sup> Wawancara dengan Branch Manager PT. Adira Finance, Rabu 3 Pebruari 2010.

pengadilan dan bersifat final serta mengikat para pihak untuk melaksanakan putusan tersebut. Jelas disini bahwa pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia berdasarkan titel eksekutorial adalah benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia wajib didaftarkan sesuai Pasal 11 ayat (1) Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, pembebanan dimaksud adalah diatur dalam Pasal 5 ayat (1) “pembebanan dengan fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta jaminan fidusia” lebih lanjut dalam Pasal 37 ayat (3) Jika dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak dilakukan penyesuaian, maka perjanjian Jaminan Fidusia tersebut bukan merupakan hak agunan atas kebendaan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 dan tidak mempunyai titel eksekutorial berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dicantumkan kata-kata "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA". Aplikasi kredit yang disediakan oleh PT. Adira Finance sebagai pemberi fasilitas, selain Perjanjian Pokok (Perjanjian Pembiayaan Konsumen) juga disediakan klausula baku Perjanjian Pemberian Jaminan Fidusia yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Konsumen Pasal 4 ayat (3) Perjanjian Pembiayaan Konsumen .

Pasal 4 Undang-undang Jaminan Fidusia nomor 42 tahun 1999 “Jaminan Fidusia yang merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian

pokok bukan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi”, yang merupakan uraian tentang Identitas Pihak Pemberi dan Penerima Fidusia, data perjanjian pokok yang dijamin fidusia, uraian mengenai Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia, nilai penjaminan dan nilai benda yang menjadi objek jaminan Fidusia, yang dalam pendaftaran fidusia dilakukan oleh Penerima Jaminan /Penerima Fidusia untuk di daftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia di Wilayah kerja Kantor Pendaftaran Fidusia di Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Azasi Manusia Provinsi Sulawesi Selatan. Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 13 tentang Perjanjian Pemberian Jaminan Fidusia yang dikatakan bahwa “Biaya yang berkenaan dengan pembuatan perjanjian ini maupun dalam melaksanakan ketentuan dalam perjanjian ini menjadi tanggungan dan harus dibayar Penerima Fasilitas/Pemberi Jaminan, demikian pula biaya pendaftaran fidusia ini di Kantor Pendaftaran Fidusia”. Dengan tidak memenuhi ketentuan dalam Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, maka Perjanjian Pemberian Jaminan Fidusia yang disediakan dan yang ditanda-tangani oleh Pemberi Fasilitas / Penerima Fasilitas hanya sebagai akta dibawah tangan, yang tidak membatalkan Perjanjian Pokok yaitu Perjanjian Pembiayaan Konsumen.

Menurut Abdul Rahman, S.H, M.H, Kasubbid Pendaftaran Fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia, Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Azasi Manusia Provinsi Sulawesi Selatan bahwa “PT. Adira

Finance Makassar sampai saat ini belum mendaftar pada Kantor Pendaftaran Fidusia wilayah Sulawesi Selatan, lebih lanjut Abdul Rahman, SH,M.H, menambahkan untuk wilayah Makassar sendiri yang merupakan Ibukota Provinsi Sulawesi Selatan masih banyak lembaga pembiayaan yang ada kaitannya dengan jaminan fidusia yang tidak mendaftar, hal ini disebabkan oleh lemahnya Undang-undang mengenai Fidusia yang hanya mewajibkan namun tidak disertai sanksi bagi siapa/lembaga yang tidak mendaftar”<sup>68</sup>.

Pasal 4 ayat (3) Hak dan Kewajiban atas Barang Jaminan dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen PT. Adira Finance menegaskan bahwa “Ketentuan jaminan tersebut akan diatur secara terpisah dalam Perjanjian Pemberian Jaminan Fidusia yang dibuat dalam bentuk dan cara yang ditentukan oleh Pemberi Fasilitas, yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini”, dengan pembuatan perjanjian pokok tentang hutang atau kredit tersebut yang menimbulkan hak dan kewajiban antara dengan Penerima Fasilitas dapat dibuat secara di bawah tangan atau dibuat oleh Notaris harus di patuhi oleh Penerima Fasilitas, sebagaimana diatur pada Pasal 5 ayat (1) Undang-undang

---

<sup>68</sup> Wawancara dengan Kasubbid Pendaftaran Fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia, Kanwil Departemen Hukum dan HAM Provinsi Sulawesi Selatan, Jum’at 5 Pebruari 2010.

Fidusia Nomor 42 tahun 1999, “Dalam rangka pembuatan akta pembebanan jaminan fidusia dibuat dengan akta Notaris dan dalam bahasa Indonesia”. Dengan memperhatikan Pasal tersebut diatas walau tidak dibuat dengan akta Notaris dan tidak didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia, istilah eksekusi tetap melekat pada pengambilan kembali barang jaminan sepeda motor akibat terjadinya wanprestasi penerima fasilitas. Pasal 196 HIR dan Pasal 208 Rbg “Eksekusi membayar sejumlah uang”<sup>69</sup>, baik dari tangan penerima fasilitas maupun dari pihak lain, kecuali barang jaminan tersebut dijadikan barang bukti dalam pengadilan.

Eksekusi pembayaran uang yaitu membayar sejumlah uang dilakukan kepada penerima fasilitas yang melakukan wanprestasi, yaitu terhadap barang jaminan yang dikuasainya dengan cara pengambilan kembali dari penerima fasilitas atau yang menyerahkan barang jaminan, sebagai catatan dalam Surat Berita Acara Serah Terima Barang Jaminan (BASTBJ), apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah serah terima barang jaminan tersebut tidak diselesaikan, maka akan dilakukan penjualan barang jaminan guna penyelesaian seluruh sisa utang penerima fasilitas kepada pemberi fasilitas. Apabila penerima fasilitas atau yang menyerahkan barang jaminan menyelesaikan pembayaran seluruh sisa

---

<sup>69</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Jogyakarta: Liberty, 1998), hal 27.

hutangnya, bisa berupa pelunasan keseluruhan sisa utang atau dengan pemberian kebijakan seperti : Back to current account revieble (BTCA) yaitu membayar maju angsuran beberapa kali bersama dengan denda dan ditambah biaya yang timbul dari pengambilan kembali barang jaminan. Hal tersebut bukan merupakan eksekusi tapi hanya merupakan mengambil kembali (sita jaminan). Jika tidak diberikan Back To Current account revieble (BTCA) tersebut, maka terhadap barang jaminan dapat langsung dilakukan eksekusi guna membayar utang melalui eksekusi lelang atau melakukan penjualan barang jaminan kepada pihak ketiga menurut cara dan harga yang dianggap baik oleh penerima kuasa atau pemberi fasilitas, sebagaimana diperjanjikan dalam surat kuasa penarikan dan asuransi kendaraan, yang merupakan bagian dari perjanjian pembiayaan konsumen<sup>70</sup>.

Ketentuan Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia tidak terpenuhi, demikian pula ketentuan sebagaimana yang terdapat dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen dan Perjanjian Pemberian Jaminan Fidusia Kota Makassar atas jaminan kebendaan tersebut menurut Hasil Penelitian penulis dilapangan tidak terpenuhi. Dengan demikian pula bahwa penjaminan kebendaannya hanya berlaku ketentuan yang tunduk pada Pasal 1131 KUHPerdara. Adapun cara

---

<sup>70</sup> Aplikasi kredit PT. Adira Finance

pemenuhan yang dapat ditempuh dan diupayakan oleh pemberi fasilitas sesuai Pasal 1131 KUHPerdara adalah :

- a. Mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Jika upaya kompromi atau damai maupun restrukturisasi tidak tercapai dan debitor tetap tidak mau memperbaiki kelalaiannya, jalan satu-satunya yang dapat ditempuh ialah "proses litigasi", menggugat debitor untuk memenuhi pelaksanaan kewajibannya melalui pengadilan, atau melalui arbitrase apabila dalam perjanjian kredit disepakati sengketa yang timbul dari perjanjian diselesaikan oleh badan arbitrase.
- b. Meminta Sita Jaminan atas harta kekayaan debitor Agar tuntutan lebih efektif dan tidak hampa (*illusoir*), kreditor dapat meminta kepada Pengadilan Negeri agar harta kekayaan debitor diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*). Dasar hukum sita jaminan adalah Pasal 227 ayat (1) RBG atau Pasal 720 RV yang menyebutkan membolehkan penyitaan barang debitor selama belum dijatuhkan putusan akhir, dengan tujuan agar barang tersebut tidak digelapkan atau tidak dihilangkan debitor, selama proses persidangan berlangsung. Dengan demikian, pada saat putusan dilaksanakan, pelunasan pembayaran utang yang dituntut dapat dipenuhi dengan menjual lelang (*executoriale verkoop*) barang sitaan itu.



## **2. Langkah-langkah sebelum mengambil kembali barang jaminan**

Menurut Raymon Felix, Branch Manager PT. Adira Finance “adalah Proses *Desk Call* atau menelpon customer untuk memberitahukan tentang waktu pembayaran angsuran yang telah jatuh tempo, mengunjungi customer untuk mengingatkan (bagi yang tidak punya telepon), melakukan penagihan, mengirimkan surat peringatan 1 (satu) dan 2 (dua)”<sup>71</sup>, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Mengingat waktu pembayaran angsuran yang telah jatuh tempo dengan menelpon atau Sending Message Service (SMS), dilakukan terhadap penerima fasilitas yang memasukkan nomor telponnya dalam aplikasi kredit, yang mengalami keterlambatan pembayaran 1 (satu) sampai 2 (dua) hari, bagi yang tidak mempunyai telepon yaitu dengan mengunjungi untuk mengingatkan.
- b. Apabila tidak ada tanggapan dari penerima fasilitas dalam 1 dan 2 hari tersebut, maka hari ke-3 nya Dept Account Revieble (AR) menugaskan Collector untuk melakukan penagihan secara langsung terhadap penerima fasilitas, penagihan ini maksimal 4 (empat) kali kunjungan dalam 1 (satu) bulan.
- c. Jika masih juga tidak dilakukan pembayaran, Dept Account Revieble (AR) melalui collectornya mengirimkan somasi (peringatan) 1, yang

---

<sup>71</sup> Wawancara dengan Branch Manager PT. Adira Finance, Rabu, 3 Pebruari 2010.

batas waktunya diberikan 7 (tujuh) hari kerja, kepada penerima fasilitas untuk membayar. Apabila somasi 1 tadi tidak ditanggapi, maka Dept Account Revieble (AR) melalui collectornya mengirimkan lagi somasi ke 2 (dua) yang batas waktunya juga 7 (tujuh) hari kerja, jika masih juga tidak dilakukan pembayaran, penerima fasilitas masih diberikan kesempatan untuk melakukan pembayaran melalui kasir-kasir PT. Adira Finance dan collector sebelum masuk Over Due (OD) <60 hari keterlambatan, apabila Over Due (OD) >60 hari keterlambatan, secara system penerima fasilitas tersebut masuk dalam kredit macet atau biasa disebut “kredit bermasalah” yang dalam istilah pembukuan lembaga pembiayaan dikenal dengan “*non-performing loan*” (NPL).

Pada PT. Adira Finance dikenal dengan ada 2 (dua) cara penerima fasilitas tersebut masuk dalam kredit macet atau biasa disebut ‘kredit bermasalah’:

- a. Pelimpahan Otomasi adalah pelimpahan yang berdasarkan langkah-langkah yang di uraikan diatas yaitu, dengan menelpon dan mengunjungi, melakukan penagih, mengirimkan surat peringatan 1 dan 2. ini dilakukan sebelum Over Due (OD) <60 hari keterlambatan, apabila melewati Over Due (OD) >60 secara system akan dengan sendirinya akan masuk dalam Problem Account List atau “*non-performing loan*” (NPL).

- b. Pelimpahan khusus dari Dept Account Revieble (AR) ke Dept Remedial berdasarkan daftar kunjungan harian (DKH) parameter 11 Unit pindah tangan, 12 Unit hilang, 13 Customer hilang selanjutnya dibuat memo pelimpahan khusus, analisis, kemudian di Aproval oleh Dept Remedial dan masuk dalam problem account list <sup>72</sup>.

Selanjutnya pada Pasal 5 Perjanjian Pembiayaan Konsumen PT. Adira Finance tentang Wanprestasi menyatakan bahwa, “Penerima fasilitas/penerima jaminan setuju dan mengikat diri kepada Pemberi fasilitas dan/atau kuasanya mengenai terjadinya / keadaan wanprestasi yang dengan lewatnya waktu telah cukup membuktikan untuk mana hal tersebut tidak perlu dibuktikan lagi akan tetapi dengan terjadinya salah satu atau lebih keadaan sebagai berikut :

1. Penerima fasilitas lalai dan/atau gagal memenuhi satu atau lebih kewajiban sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian ini dan/atau Perjanjian Pemberian Jaminan Fidusia.
2. Penerima fasilitas tidak / lalai melakukan pembayaran angsuran Hutang Pembiayaan pada tanggal jatuh tempo angsuran”.

Dengan ketentuan Pasal tersebut diatas menjadi alasan PT. Adira Finance melakukan penarikan kembali barang jaminan dari penerima fasilitas atau dari pihak ke-3.

---

<sup>72</sup>Remedial Blueprint Traning, Adira Finance, 2010.

### **3. Penugasan Remedial Fiel dan Dept Collector (DC)**

Menurut Gunawan Sabara, SH, Litigation Dept. Head, Setiap pagi hari, Remedial Field dan Dept Collector (DC) menerima penugasan dari remedial yang disertai/dibekali dengan berkas sebagai berikut :

a. Dokumen primer

- 1) Surat Tugas untuk Remedial Field atau Surat Kuasa Penarikan Kembali untuk Dept Collector.
- 2) Surat Berita acara serah terima barang jaminan (BASTBJ)

b. Dokumen optional adalah dokumen yang diadakan untuk mendukung kelancaran kerja Remedial Field, sesuai dengan kondisi daerah masing-masing, anatara lain :

- 1). Copy kontrak (Perjanjian Pemberian Konsumen, Perjanjian Pejanjian Pemberian Jaminan Fidusia);
- 2). Data A/R Card ( Jadwal pembayaran angsuran);
- 3). Data Remedial Card (Data motor dan Penerima fasilitas);
- 4). Daftar kunjungan Remedial field<sup>73</sup>.

---

<sup>73</sup>Wawancara dengan Litigation Dept. Head PT. Adira Finance, Rabu 3 Pebruari 2010.

Menurut Gunawan Sabara, S.H. Litigation Dept. Head PT. Adira Finance “selain dari karyawan lapangan Remedial Field PT. Adira Finance Kota Makassar bekerjasama dengan pihak luar untuk membantu penyelesaian kredit bermasalah tersebut bentuknya adalah memeberikan kuasa kepada individu atau institusi-institusi seperti lawyer untuk mengambil dan atau menyelesaikan kredit bermasalah tersebut”<sup>74</sup>.

Hasil penelitian penulis dilapangan terlihat bahwa individu-individu yang dimaksud adalah orang-perorang yang mempunyai kemampuan dalam negosiasi, pengaruh, disegani pada daerah-daerah tertentu, ulet dan dapat dipercaya, dengan mendapat surat kuasa yang selanjutnya disebut Penerima Kuasa dan di lapangan lebih kenal dengan dept collecktor (DC) dari PT. Adira Finance Kota Makassar untuk melakukan pengambilan kembali barang jaminan.<sup>75</sup>

#### **4. Pelaksanaan pengambilan kembali barang jaminan.**

Setelah menerima kasus pelimpahan khusus atau pelimpahan otomatis surat tugas/surat kuasa, dokumen primer dan optional, Remedial field atau DC dari dept remedial, tersebut langsung mendatangi alamat yang ada dalam data remedial card untuk mengambil kembali barang

---

<sup>74</sup>Wawancara dengan Litigation Dept. Head PT. Adira Finance, Rabu 3 Pebruari 2010.

<sup>75</sup>Remedial Blueprint Traning PT. Adira Finance.

jaminan menarik jika barang jaminan ada maka langsung diambil dan dibawa ke Kantor Adira Finance Kota Makassar (jika dalam area kerja PT. Adira Makassar), sedangkan apabila barang jaminan tidak ada atau sudah dialihkan maka Remedial field atau DC akan meminta penerima fasilitas menjelaskan kenapa barang jaminan dialihkan, “meminta dan melibatkan penerima fasilitas menunjuk kemana barang jaminan dialihkan untuk kemudian sesuai perjanjian diminta untuk menyerahkan barang jaminan tersebut”<sup>76</sup>.

Menurut DC Amiruddin “kasus yang demikian tidak mudah dilakukan penarikan, karena pengalihan bukan atas dasar pinjaman semata tapi bisa karena dijual, digadai atau barang jaminan sudah keluar dari wilayah kerja PT. Adira Finance Kota Makassar, bahkan keluar dari Pulau Sulawesi<sup>77</sup> (Kota Makassar, Kabupaten Maros dan Kabupaten Gowa). Apabila barang jaminan dialihkan masih dalam wilayah kerja PT. Adira kota Makassar, maka Remedial field atau DC mendatangi pemegang terakhir barang jaminan dan memberikan penjelasan kenapa barang jaminan tersebut hendak dilakukan penarikan disertai dengan menunjukan dokumen-dokumen tersebut di atas, Remedil field atau DC menerima penyerahan kendaraan sepeda motor dari Penerima fasilitas maka di buatkan Berita acara serah terima barang jaminan (BASTBJ)

---

<sup>76</sup>Wawancara dengan Litigation Dept. Head PT. Adira Rabu 3 Pebruari 2010.

<sup>77</sup>Hasil wawancara dengan Dept Collektor Kamis 4 Pebruari 2010.

kemudian barang jaminan langsung bawa ke kantor PT. Adira Finance Kota Makassar.

Menurut Pasal 197 ayat (5) HIR atau Pasal 209 ayat (4) RBG Pejabat yang menjalankan eksekusi diperintahkan secara tegas untuk membuat "berita acara" eksekusi. Keabsahan formal eksekusi hanya dapat dibuktikan dengan berita acara, menjalankan eksekusi ini harus dituangkan dalam berita acara dan harus disaksikan dan ditandatangani oleh pihak yang menjalankan eksekusi dan dua orang saksi dianggap tidak sah, karena belum memenuhi syarat formal cara menjalankan eksekusi. Apalagi keikutsertaan tereksekusi menandatangani sangat penting artinya, sebagai alat untuk mematahkan tuduhan dikemudian hari".

Setelah pengambilan kembali menurut Gunawan Sabara, S.H. Litigation Dept. Head PT. Adira Finance "menjadi prosedur wajib yang harus dilakukan oleh petugas ADIRA internal ataupun eksternal untuk membuat Berita acara serah terima barang jaminan (BASTBJ)<sup>78</sup>, baik dari penerima fasilitas atau pihak ke-3, apabila yang menyerahkan barang jaminan tidak mau menandatangani Berita acara serah terima barang jaminan maka, dalam berita acara serah terima barang jaminan tersebut diberi keterangan, bahwa yang menyerahkan tidak mau menandatangani

---

<sup>78</sup> Wawancara dengan Litigation Dept. Head PT. Adira Rabu, 3 Pebruari 2010.

bukti serah terima barang jaminan (BASTBJ), dan sebagai catatan dalam surat bukti serah terima barang jaminan (BASTBJ) tersebut yang menyerahkan/ customer barang jaminan di mohon agar menyelesaikan di kantor ADIRA selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal penyerahan barang jaminan tersebut dan penerima fasilitas dapat memohon perpanjangan waktu selama 6 (enam) hari kerja, ini diberikan terkait kebijakan apabila customer ada permasalahan atau musibah <sup>79</sup>.

Remedial field atau dept collector sebelum melakukan pengambilan kembali barang jaminan harus bisa mengecek barang jaminan apakah sesuai dengan data remedial card, karena banyak sepeda motor di Kota Makassar dan Kabupaten Gowa yang telah dimodifikasi, Hasil penelitian dilapangan, Penulis melihat bahwa banyak sepeda motor bodong yang ada diamankan pada kedua kantor Polresta Makassar Timur tersebut, bahkan nomor rangka dan nomor mesinnya telah di hapus, salah satu yang harus dilakukan adalah melakukan penggosokan nomor mesin dan nomor rangka, kemudian di tempel pada berita acara serah terima barang jaminan (BASTBJ), ini dilakukan agar tidak terjadinya kesalahan yang akan berbuntut masalah di kemudian hari.

Apabila barang jaminan diketahui dengan jelas berada luar wilayah kerja PT. Adira Finance Kota Makassar, maka Dept Remedial PT.

---

<sup>79</sup>Wawancara dengan Litigation Dept. Head PT. Adira Rabu 3 Pebruari 2010.



Adira Finance Kota Makassar akan meminta bantuan Dept Remedial kantor cabang PT. Adira Finance setempat (“PT.Adira memiliki 245 kantor cabang yang langsung melayani 1.400 dealer berbagai jenis merek kendaraan sepeda motor serta 276 pusat layanan. Di samping itu, ADIRA juga memiliki kemitraan dengan 2.300 dealer lainnya, seperti dealer sepeda motor bekas dan toko peralatan, rumah seluruh Indonesia”)<sup>80</sup>, di mana barang jaminan tersebut berada untuk dilakukan penarikan atas barang jaminan sesuai data primer dan data optional yang dikirim. Apabila lokasi keberadaan barang jaminan tersebut tidak ada kantor PT. Adira Finance, maka Dept Remedial PT. Adira Finance Kota Makassar akan mengirim seorang atau beberapa Remedial Field atau Dept Collector (DC) untuk melakukan penarikan barang jaminan tersebut, Menurut Dept Collector (DC) Anton “pada tahun 2009 saya dan beberapa Dept Collector (DC) diutus untuk melakukan penarikan barang jaminan di Kabupaten Gowa dan Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan keterangan yang ada di PT. Adira Finance Kota Makassar, pada tahun 2009 di perkirakan sekitar 100 unit sepeda motor ada di daerah tersebut<sup>81</sup>.

## **5. Proses lanjutan setelah penarikan barang jaminan.**

Remedial field atau DC wajib menyerahkan Unit kendaraan hasil penarikannya ke kantor ADIRA dalam waktu 1 x 24 jam, kecuali dalam hal

---

<sup>80</sup> Profil PT.ADIRA <http://www.Adira.kredit.com>.

<sup>81</sup> Wawancara dengan DC, Kamis 4 Pebruari 2010.

husus dan dapat dibuktikan kebenarannya, misalnya keamanan ADIRA, dan memberikan laporan atas hasil kunjungan berdasarkan surat tugas atau surat kuasa yang diterimanya. Setelah barang jaminan tiba di kantor ADIRA, Remedial akan mengirimkan surat pemberitahuan ke penerima fasilitas untuk untuk melunasi seluruh hutangnya di ADIRA tenggang waktu yang diberikan 7 (tujuh) hari dari tanggal penyerahan kendaraan dan Penerima fasilitas dapat memohon perpanjangan waktu selama 6 (enam) hari kerja, ini diberikan terkait kebijakan apabila customer ada permasalahan atau musibah<sup>82</sup>, jika sampai batas waktu yang diberikan penerima fasilitas belum melunasi maka akan dilakukan reproses atau proses aktiva yang dikuasai (WD). Namun dalam waktu 7 (tujuh) di tambah dengan 6 (enam) hari berikutnya, ada dua proses yang diberikan oleh pemberi fasilitas kepada penerima fasilitas yaitu :

a. Proses Pelunasan

Apabila penerima fasilitas bersedia untuk melakukan pelunasan hutangnya setelah kendaraan ditarik atau setelah setelah proses negosiasi dengan remedial field, maka penerima fasilitas membawa KTP asli dan copy berita acara serah terima barang jaminan (BASTBJ) untuk diserahkan ke Remedial di kantor ADIRA Remedial meminta AR untuk mengeluarkan print out Draft Pelunasan.

---

<sup>82</sup> Wawancara dengan Litigation Dept. Head PT. Adira, Rabu 3 Pebruari 2010.

### Negosiasi Nilai Pelunasan

Apabila penerima fasilitas berkeberatan atas jumlah pelunasan tersebut dengan alasan yang dapat diterima oleh ADIRA, maka dapat dilakukan negosiasi pelunasan dengan nilai discount pelunasan dalam SK Direksi.

#### b. Proses BTCA Komite ( Back To Current A R)

BTCA adalah diperbolehkannya penerima fasilitas yang telah wanprestasi untuk melakukan pembayaran angsuran seperti biasanya dengan persetujuan Back to current AR Komite. Back to current AR diperbolehkan dengan alasan yang dapat diterima oleh komite, antara lain musibah/sakit/kecelakaan yang dialami penerima fasilitas yang membutuhkan biaya sehingga penerima failitas tidak mampu membayar angsuran secara temporary. Back to current AR Komite dilakukan dengan proses permohonan dari penerima fasilitas beserta bukti kwitansi pengeluaran biaya rumah sakit/dokter dan lain-lain (jika ada). Surat permohonan tersebut diteruskan oleh remedial ke komite yang terdiri dari Branch Manager, AR Control dan Remedial, jika disetujui penerima harus membuat surat pernyataan untuk tidak akan lalai lagi membayar angsuran di ADIRA. Proses Back to current AR dapat pula dilakukan tanpa penyerahan kendaraan ke ADIRA terlebih dahulu penerima fasilitas datang ke kantor ADIRA untuk memohon

BTCA<sup>83</sup>.

Prinsip dasar negosiasi dalam penyelesaian kasus yaitu :

- 1). Asas persamaan hak dan kedudukan antara penerima fasilitas dan pemberi fasilitas
- 2). Menjaga etika dan norma umum
- 3). Musyawarah
- 4). Win win solution
- 5). Customer service<sup>84</sup>

Rahman salah seorang penerima fasilitas yang memohon Back to current AR mengatakan “permohonan yang diduplikatnya dari nya ADIRA yaitu membayar maju angsuran 2 bulan ke depan dari 3 bulan keterlambatannya pembayaran angsuran, ditambah biaya Remedial, sementara dendanya dibayar cicil pada bulan-bulan selanjutnya.”<sup>85</sup>

Adapun yang penerima fasilitas yang tidak mendapat kebijakan sampai batas waktu yang diberikan selama 7 (tujuh) hari, yaitu berupa Back to current AR, maka salah satu jalan adalah pelunasan total seluruh angsuran, di tambah denda (yang timbul dari tidak dibayarkannya angsuran setiap tanggal jatuh tempo) dan biaya penarikan Apabila

---

<sup>83</sup>Remedial Blueprint Training, Adira Finance, 2010.

<sup>84</sup>Remedial Blueprint Training, Adira Finance, 2010.

<sup>85</sup>Wawancara dengan salah satu konsumen PT. Adira Makassar, Kamis 4 Februari 2010.

penerima fasilitas dapat melakukan pelunasan total maka perjanjian berakhir, barang jaminan akan diserahkan kembali kepada penerima fasilitas disertai BPKB (Buku kepemilikan kendaraan bermotor), sebaliknya jika penerima fasilitas tidak sanggup melakukan pelunasan total Pasal 7 ayat (2) huruf b Perjanjian Pembiayaan Kosumen PT. Adira Finance “Apabila penerima fasilitas tidak dapat melunasi seluruh/sisa hutang pembiayaan, maka pemberi fasilitas berhak sebagaimana penerima fasilitas/pemberi jaminan setuju untuk menarik atau mengambil barang jaminan dan melakukan penjualan, menerima uang hasil penjualan dan memperhitungkan dengan seluruh/sisa hutang pembiayaan yang masih ada dari penerima fasilitas atau dari pihak lain siapapun yang menguasai barang jaminan tersebut”.

Terhadap barang jaminan yang telah dilakukan penarikan dan tidak bisa di selesaikan, Menurut Guanawan Sabara, S.H, Litigation Dept. Head PT. Adira Finance “adalah melakukan penjualan terhadap barang jaminan untuk kemudian hasil penjualan akan dipergunakan untuk menutupi sisa hutang penerima fasilitas sesuai dengan kalkulasi yang sudah disepakati”<sup>86</sup> dalam penjualan barang jaminan tersebut, Hasil Penelitian Penulis dilapangan terlihat bahwa, ditangani oleh Dept UMC sebagai salah satu bagian yang ada pada di PT. Adira Finance, penjualan

---

<sup>86</sup>Wawancara dengan Litigation Dept. Head PT. Adira Finance, Rabu 3 Pebruari 2010.

dilakukan kepada dealer motor bekas yang sudah bekerja sama dengan PT. Adira Finance dan kendaraan tersebut dapat di jaminkan lagi sebagai jaminan kebendaan pada perjanjian pembiayaan konsumen PT. Adira Finance yang baru.

Penulis tidak sependapat dengan upaya yang dilakukan oleh PT. Adira Finance Kota Makassar dalam melakukan eksekusi terhadap benda jaminan fidusia, dengan alasan bahwa pada prinsipnya PT. Adira Finance Kota Makassar tidak menggunakan lembaga jaminan fidusia sebagaimana diatur oleh Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia karena pengikatan jaminan tidak dilakukan dengan akta otentik sehingga secara langsung juga tidak dapat didaftarkan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 5 ayat (1) dan pasal 11 ayat (1) Undang-undang Fidusia. Karena yang didaftarkan di kantor pendaftaran fidusia hanya akta fidusia yang dibuat notaris dalam bahasa indonesia. Oleh karena itu PT. Adira Finance Kota Makassar dalam pembuatan perjanjian fidusia tidak memenuhi ketentuan yang ada dalam ketentuan Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia, maka tidak merupakan perjanjian fidusia dan dianggap utang piutang biasa, PT. Adira Finance Kota Makassar sebagai kreditur konkuren sehingga apabila dibitur wanprestasi maka diberlakukan Pasal 1131 KUH Perdata yang apabila kreditur wanprestasi harta kekayaan debitur sebagai jaminan umum bagi kreditur.

**B. Hambatan-hambatan apa saja dalam eksekusi obyek jaminan Fidusia pada PT. Adira Finance Kota Makassar dan Upaya-upaya apa untuk menyelesaikannya.**

Menurut Gunawan Sabara, S.H. Litigation Dept. Head PT. Adira Finance “hambatan yang dialami adalah ketika barang jaminan sudah berpindah tangan, tanpa persetujuan tertulis dari PT. Adira finance”<sup>87</sup>.

**1. Hambatan-hambatan dalam melakukan pengambilan kembali barang jaminan**

Adapun hambatan-hambatan dalam pengambilan barang jaminan yaitu:

**a. Barang jaminan di jual**

Penjualan yang di maksud adalah barang jaminan di jual tunai tanpa disertai janji-jani kepada pihak ke-3 oleh penerima fasilitas, adapun alasan-alasan penerima fasilitas menjual barang jaminan seperti, membutuhkan uang yang mendesak, karena barang jaminan sepeda motor yang mudah dialihkan, maka cepat mendatangkan uang untuk menutupi kebutuhan penerima fasilitas, yang sifatnya membantu penerima fasilitas dalam hal kebutuhan yang mendesak seperti, biaya perawatan

---

<sup>87</sup>Wawancara dengan Litigation Dept. Head PT. Adira Finance, Rabu 3 Pebruari 2010.

sakit, dan biaya sekolah, dan penerima fasilitas yang dari awal tidak beritikad baik sengaja mengajukan permohonan menjadi penerima fasilitas kemudian barang jaminan tersebut untuk di jual lagi, untuk mendapatkan keuntungan, sementara banyak pembeli barang jaminan tersebut tidak mengerti tentang asal usul barang jaminan dan tidak mempermasalahkan Surat TandaKendaraan Bermotor (STNK) dan Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB).

b. Barang jaminan di gadaikan.

Proses gadai yang di maksud adalah gadai dibawah tangan antara penerima jaminan dengan pihak ke-3 dengan obyek jaminan adalah barang jaminan dari Perjanjian Pembiayaan Konsumen PT. Adira Finance, Adapun uang gadai yang dimaksud lebih kurang Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) sampai Rp.1.500.000 (satu juta limaratus ribu rupiah), jenis sepeda motor tidak dimasalahkan, tapi kondisi sepeda motor tetap diperhatikan, dengan ketentuan yang bervariasi berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak”<sup>88</sup>. Berdasarkan gadai antara penerima fasilitas dengan penerima gadai, maka pemegang gadai akan bertahan untuk tidak memberikan barang jaminan tersebut ketika akan dilakukan penarikan oleh remedial field atau dept collektor.

c. Penerima fasilitas tidak mampu lagi

---

<sup>88</sup> Hasil Wawancara dengan Dept Collector PT. Adira Finance, Rabu tanggal 3 Pebruari 2010.



Ketika penerima fasilitas sudah tidak mampu lagi melanjutkan pembayaran angsurannya, penerima fasilitas melakukan oper kredit dengan pihak ke-3 (Over kredit di bawah tangan). Yang dimaksud over ke pihak ke3 adalah dengan orang yang menguasai sepeda motor, serta yang akan melakukan pemembayar seluruh sisa angsuran sepeda motor kepada PT. Adira Finance Kota Makassar. Adapun ketentuan-ketentuan over kredit yang dimaksud diatas yaitu dengan penggantian sejumlah uang tertentu, sesuai kesepakatan kedua belah pihak (penerima fasilitas dengan pihak ke3), menurut Hamsah Dg Rate “dengan mengoper sepeda motor sesuai harga kesepakatan maka saya cepat mendapatkan uang, untuk kebutuhan biaya perawatan sakit”<sup>89</sup>. Menurut Faiz Wardhin,S.H, Remedial Administrasi PT. Adira Finanace Kota Makassar “Penerima gadai seperti ini akan mengalami macet dan barang jaminan akan di alihkan lagi.

d. Pendapatan bulanan penerima jaminan yang tidak menentu

Penerima fasilitas hanya mengandalkan salah satu sumber pendapatan untuk pembayaran angsuran seperti tukang ojek, sehingga kalau tidak mampu lagi penerima fasilitas mengalihkan barang jaminan tersebut dengan harga yang sangat bervariasi ini tergantung dari jenis,

---

<sup>89</sup>Wawancara dengan salah satu konsumen PT. Adira Finance, Kamis 4 Pebruari 2010.

keadaan sepeda motor dan uang muka yang disetor oleh penerima fasilitas kepada pemberi fasilitas sebelum penyerahan barang jaminan.

e. Penerima fasilitas atas nama

Penerima fasilitas atas nama biasanya akan diberi imbalan sejumlah uang Rp.500.000 sampai Rp.1.000.000 oleh pihak ke-3 (pengguna barang jaminan) yang memanfaatkan identitas penerima fasilitas, ini dilakukan karena beberapa hal antara lain :

- 1) Pihak lain tersebut sudah di black list oleh PT. Adira Finance Kota Makassar;
- 2) Pihak lain tidak masuk dalam area kerja PT. Adira Finance Kota Makassar;
- 3) Pihak lain tidak layak menurut hasil survey dari Dept. Kredit PT. Adira Finance Kota Makassar.
- 4) Pihak lain tersebut adalah berasal dari kecamatan yang di black list karena alasan tertentu oleh PT. Adira Finance Kota Makassar;<sup>90</sup>

Karena atas nama salah satu alasan tersebut di atas, maka selanjutnya penerima fasilitas yang tercantum dalam perjanjian pembiayaan konsumen lepas tangan, sementara alamat pemegang barang jaminan tidak jelas, jika terjadi macet dan keberadaannya susah dilacak.

---

<sup>90</sup> Wawancara dengan Remedial Administrasi PT. Adira Finance Makassar Kamis 4 Pebruari 2010.

f. Kurangnya pemahaman penerima fasilitas atas isi Perjanjian Pembiayaan Konsumen dan Perjanjian Pemberian Jaminan Fidusia

Sebagian besar banyak penerima fasilitas dari PT. Adira Finance Kota Makassar yang tidak membaca dengan baik isi dari perjanjian pembiayaan konsumen, perjanjian pemberian jaminan fidusia dan dokumen tambahan lainnya sehingga penerima fasilitas tidak menyadari bahwa mengalihkan barang jaminan tidak merupakan melanggar perjanjian, menurut Hamsah Dg Rate “pada saat menandatangani aplikasi kredit pada PT. Adira Finance Kota Makassar tidak membaca dengan baik-baik isi dokumen serta mendengarkan penjelasan dari karyawan Adira”<sup>91</sup>, sementara Hasil Penelitian Penulis dilapangan melihat bahwa lembaran aplikasi Perjanjian Pembiayaan Konsumen dan Perjanjian Pemberian Jaminan Fidusia dibuat dalam huruf yang kecil (Font 10) dan banyak sehingga menyulitkan penerima fasilitas untuk membaca, apalagi yang mengalami gangguan mata, tidak bisa membaca dengan baik dan bahasa indonesia.

Pasal 18 (ayat) 2 Undang-undang Nomor 8 tahun 1999, tentang Perlindungan Konsumen “Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca

---

<sup>91</sup>Wawancara dengan salah satu konsumen PT. Adira Finance, Kamis 4 Pebruari 2010.

secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti”.

g. Penerima fasilitas pindah Alamat (tidak diketahui)

Penerima fasilitas pindah alamat, kepindahan tersebut tidak diinformasikan ke PT. Adira Finance Kota Makassar. Menurut Faiz Wardhin, S.H Remedial Administrasi PT. Adira Finance Kota Makassar, “Pindah alamat tanpa diketahui di mana alamat barunya, sangat menyulitkan kami untuk melacak keberadaan sepeda motor Yamaha, guna di lakukan penarikan”<sup>92</sup>. Pindah alamat tanpa memberitahukan ke pemberi fasilitas adalah salah satu bentuk tidak beritikad baiknya penerima fasilitas pada perjanjian pembiayaan konsumen yang telah di tanda-tanganinnya.

h. Identitas barang telah diubah

Perubahan yang dimaksud adalah seperti nomor mesin dan rangka sepeda motor Yamaha dihapus, sepeda motor yang demikian dikenal dengan sepeda motor bodong. Penghapusan identitas sepeda motor dilakukan agar jaminan tidak diketahui oleh remedial field/dept collektor pada saat akan di lakukan penarikan. Penghapusan nomor mesin dan nomor rangka barang jaminan tersebut biasanya dilakukan terhadap sepeda motor yang bermasalah, kredit macet dan hasil curian.

Adapun keberadaan sepeda motor bodong biasanya ada di daerah-daerah atau disekitar kompleks yang jauh dari penegakan hukum

---

<sup>92</sup>Wawancara dengan Remedial Administrasi PT. Adira Finance Makassar Kamis 4 Pebruari 2010.

berlalu-lintas, dengan demikian mereka bebas menggunakan sepeda motor tersebut tanpa khawatir ada petugas polisi lalu lintas yang melakukan pemeriksaan sepeda motor.

Hasil penelitian penulis dilapangan sempat melihat sepeda motor Yamaha yang nomor mesin dan nomor rangka tidak ada di Kecamatan Tamalanrea, Kecamatan Panukakang, Kota Makassar, dari keterangan pemegang motor Mustari mengatakan “sepeda motor Yamaha yang yang dipakai adalah motor yang di beli dari seseorang yang bernama Arifuddin dari Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar”<sup>93</sup> lebih lanjut di tanyakan berapa harganya Rustam tidak mau menjawab.

Dari hasil penelitian Penulis dilapangan menilai bahwa, keadaan tersebut di atas di akibatkan harga sepeda motor bodong yang relatif murah dan penegakan hukum berlalu-lintas yang tidak tegas mengakibatkan banyak motor bodong di masyarakat, lebih-lebih lagi pembeli motor bodong yang tidak sadar hukum.

Keberadaan motor bodong tersebut tidak bisa dilakukan penarikan oleh PT. Adira Finance Kota Makassar karena tidak sesuai dengan dokumen optional yang di bawa oleh remedial field dan dept collektor, namun apabila dapat dibuktikan dengan kronologi dari penerima fasilitas, jenis dan type sepeda motor Yamaha maka sepeda motor tersebut dapat

---

<sup>93</sup> Wawancara dengan pemegang sepeda motor bodong, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, 6 Pebruari 2010.

dilakukan penarikan dan di koordinasikan dengan pihak kepolisian setempat guna proses lebih lanjut.

- i. Wilayah kerja Remedial Field dan Dept Collector (DC) yang luas dan krakter masyarakat

PT. Adira Finance Kota makassar yang memiliki wilayah kerja sangat luas meliputi Kota Makassar dengan 14 Kecamatan, Kabupaten Maros dengan 14 Kecamatan dan Kabupaten Gowa dengan 14 Kecamatan, yang jarak tempuh dari Kota Kabupaten ke Kota Kecamatan yang rata-rata harus di tempuh dengan 2 jam bahkan 3 jam perjalanan ,bahkan ada beberapa desa yang susah di lalui seperti Desa Tompo bulu, Kecamatan Moncong Loe, Kabupaten Maros, tempat seperti ini menjadi tempat pengalihan sepeda motor Yamaha karena jauh dari penegakan peraturan berlalu-lintas.

Pada tahun 2009 di Kecamatan Biringkanaya, Kecamatan Somba Opu, Kecamatan Tamalanrea yang letaknya masih sulit terjangkau yang merupakan daerah tertinggal dan mengalami satu kendala dalam melakukan penarikan barang jaminan, yang mana Remedial PT. Adira Finance Makassar Firdaus mangatakan “saya bersama DC di hadang dan diancam oleh masyarakat yang tidak terima dengan penarikan yang di lakukan oleh kami, dengan menutup akses keluar dari kecamatan itu kami

di paksa untuk mengembalikan sepeda motor yang telah kami tarik tadi, kami tidak pilihan lagi, dari pada kami dibunuh”<sup>94</sup>.

Karakter masyarakat Makassar yang juga keras apalagi budaya sirri, yang mengutamakan cara-cara kekerasan dari pada negosiasi terhadap barang jaminan hasil pengalihan dari penerima fasilitas, di beberapa kecamatan Kota Makassar dan Kecamatan “di Kecamatan Biringkanaya dan Kecamatan Somba Opu, Kecamatan Tamalanrea sampai sekarang masih di blacklist oleh PT Adira Finance Kota Makassar seperti yang di sampaikan oleh Faiz Wardhin,S.H, Remedial Administrasi Dept Remedial”<sup>95</sup>, membuat remedial dan dept collector sering mengalami ancaman fisik dan di teriakin maling oleh pemegang terakhir dan orang sekitarnya.

## **2. Upaya-upaya mengatasi hambatan-hambatan pengambilan kembali barang jaminan oleh PT. Adira Finance Kota Makassar.**

Menurut Gunawan sabara, S.H, Litigation Dept. Head, PT. Adira Finance, “Meminta dan melibatkan penerima fasilitas untuk menunjuk kemana barang jaminan di jual untuk kemudian sesuai perjanjian diminta untuk menyerahkan barang jaminan tersebut, apabila langkah diatas

---

<sup>94</sup> Wawancara dengan Remedial PT. Adira Kota Makassar, Kamis 4 Pebruari 2010.

<sup>95</sup> Wawancara dengan Remedial Admin PT. Adira Kota Makassar, Kamis4 Pebruari 2010.

tidak berhasil dan ternyata ditemukan adanya unsur pidana, maka perusahaan akan melakukan langkah pelaporan ke Kepolisian atas dugaan telah terjadi tindak pidana oleh customer dengan atau tanpa melibatkan pihak lain”<sup>96</sup>.

Adapun langkah sebelum di lakukan pelaporan ke Kepolisian dan yang terus menerus dilakukan adalah :

1. Menawarkan Kebijakan

- a. Back to current account revieble (BTCA)

Pemberian kebijakan di dasarkan itikad baik dari penerima fasilitas, tanpa barang jaminan di tarik, yaitu dengan membayar angsuran yang tertunggak, di tambah denda yang timbul akibat tidak dibayarnya angsuran, (jika di setuju denda dibayar kemudian) dan biaya remedial. Pemberian kebijakan berupa Back to current account revieble (BTCA) menjadi penerima fasilitas lancar lagi (account normal).

- b. Back to remedial :

Pemberian kebijakan ini karena barang jaminan sulit dilakukan penarikan, tapi penerima fasilitas mau membayar angsuran tapi tidak sesuai dengan angsuran tertunggak, walau tidak menjadi penerima fasilitas lancar lagi (account normal), tapi ada itikad baik

---

<sup>96</sup> Wawancara dengan Litigation Dept. Head, PT. Adira Finance, tanggal Rabu 3 Pebruari 2010.



penerima fasilitas mau membayar. Kasus back to remedial akan tetap di tangani oleh dept remedial sampai account lancar secara otomatis kembali ke dept account revieble (AR).

2. Tetap mendatangi penerima fasilitas

Kunjungan rumah penerima fasilitas dan di tempat penerima fasilitas bekerja (bagi yang bekerja) untuk memberikan rincian pelunasan di muka kepada penerima fasilitas dan apabila tidak ada tanggapan, meminta kepada penerima fasilitas untuk menunjuk dan memberikan keterangan di mana barang jaminan di sembunyikan, dijual, digadai atau dititipkan.

Kehadiran remedial field atau dept collector yang terus menerus seperti ini akan berpengaruh pada nama baik penerima fasilitas sebagai penerima jaminan yang tidak bertanggung jawab atas kewajibannya di lingkungan masyarakat sekitar rumahnya.

3. Mengawasi rumah penerima fasilitas

Pengawasan terhadap rumah penerima di lakukan apabila berdasarkan keterangan tetangga penerima fasilitas yang di bisa dipercaya oleh remedial field/dept collector di yakini bahwa barang jaminan masih ada di dalam rumah penerima fasilitas dan di gunakan pada waktu-waktu tertentu, apabila benar demikian maka remedial field/dept collector akan menunggu sampai waktu itu tiba.

4. Melibatkan informan tetap atau lepas

Remedial field/dept collector dalam melaksanakan tugasnya biasanya merekrut informan untuk membantu melacak keberadaan barang jaminan baik di rumah penerima fasilitas atau di tempat yang yakini tempat pengalihan barang jaminan.

5. Ikut terlibat razia bersama pihak berwajib (polisi lalu lintas)

Keterlibatan dalam razia lalu-lintas bersama satuan Polisi lalu-lintas di Wilayah hukum Polresta Makassar, Kecamatan Tamalanrea dan Kecamatan Biringkanaya untuk mencari barang jaminan, razia adalah satu upaya guna mencari barang jaminan yang sulit di lakukan dari tangan penerima fasilitas atau yang sudah dialihkan. Razia bersama polisi lalu-lintas salah satu cara meminimalisasi keributan pada saat melakukan suatu penarikan.

6. Melakukan sweeping

Sweeping dilakukan dengan permohonan bantuan kepada aparat Kepolisian dari Polresta dan Sekta pada daerah-daerah yang diduga menjadi tempat pengalihan barang jaminan barang jaminan, seperti: Kecamatan Tamalenrea, Kecamatan Biringkanaya, Kecamatan Balla Parang, Kecamatan Wajo, Kecamatan Tamalate dan Kecamatan Somba Upu daerah-daerah tersebut rawan keributan, sehingga menyulitkan remedial field atau dept collector untuk melakukan sendiri penarikan barang jaminan. Sweeping di lakukan cara terus menerus, terjadwal setiap bulan dan bergilir setiap daerah.

Selain sweeping di wilayah kerja PT. Adira Finance Kota Makassar, sweeping juga pernah dilakukan seperti di Kabupaten Maros dan Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan, karena daerah-daerah tersebut merupakan daerah perbatasan kota Makassar yang dimana menjadi tempat pengalihan barang jaminan terbanyak.

#### 7. Pelaporan kepolisian

Apabila langkah-langkah di atas tidak mampu berhasil dan penerima fasilitas tidak dapat bekerjasama dalam penyelesaian kredit macet, malah mengancam remedial field atau dept collector (DC) dengan kekerasan disaat mereka melaksanakan tugasnya untuk melakukan pengambilan kembali barang jaminan, maka laporan ke Kepolisian atas tindakan penggelapan barang jaminan oleh penerima fasilitas adalah satu cara untuk menyelesaikan kredit macet dan memberikan pelajaran bagi penerima fasilitas yang lain untuk tidak mengalihkan barang jaminan adapun tindakan yang pidana pernah dilakukan pada tahun 2009 sejumlah 25 (dua puluh lima) penerima fasilitas, masing-masing 5 (lima) penerima fasilitas yang berdomisili di Kota Makassar, 10 (sepuluh) penerima fasilitas yang berdomisili di Kecamatan Biringkanaya dan 10 (sepuluh) lagi penerima fasilitas yang berdomisili di Kecamatan Somba Upu, dilaporkan ke masing-masing Polres setempat dengan dugaan telah terjadi tindak pidana

penggelapan terhadap barang jaminan yang dilakukan oleh Penerima fasilitas. Terhadap laporan tersebut di atas sudah 5 (lima) penerima fasilitas yang di jatuhkan putusan pidana penggelapan oleh Pengadilan Negeri Makassar dan 3 (tiga) penerima fasilitas yang di jatuhkan putusan pidana penggelapan oleh Pengadilan Negeri Makassar<sup>97</sup>.

Upaya pelaporan yang dilakukan oleh pihak PT. Adira Finance Kota Makassar kepada pihak kepolisian karena adanya tindak pidana penggelapan diatas, menurut Penulis adalah tidak tepat. Alasannya, dalam perjanjian pembiayaan konsumen dan perjanjian jual beli yang dilakukan bukan termasuk kategori sewa beli dimana jika obyeknya dijual atau digadaikan terjadi tindak pidana penggelapan karena hak milik atas benda baru beralih kepada penyewa beli setelah angsuran terakhir lunas. Dalam kasus ini pada prinsipnya hak milik atas benda sudah beralih ketangan pembeli yang dibuktikan dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) sudah atas nama pembeli, hanya saja Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) tersebut tidak diberikan kepada pembeli dengan maksud untuk dijadikan jaminan dalam perjanjian pembiayaan

---

<sup>97</sup>Wawancara dengan Remedial Admin PT. Adira Kota Makassar, Kamis 4 Pebruari 2010.

konsumen tersebut. Fakta yang lain juga dapat dilihat bahwa pembelian kendaraan bermotor tersebut sebenarnya dilakukan secara kontan bukan melalui sewa beli, hanya saja yang membayar secara kontan adalah perusahaan Pembiayaan yaitu PT. Adira Finance Kota Makassar. Sehingga jika terjadi penjualan, penggadaian, perubahan status kendaraan yang dilakukan oleh pembeli tidak termasuk dalam kategori tindak pidana penggelapan, namun merupakan wanprestasi.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan hasil analisa penulis, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Eksekusi obyek jaminan Fidusia di PT. Adira Finance kota Makassar dilakukan terhadap customer yang melakukan wanprestasi dengan pengambilan kembali barang jaminan dari tangan customer maupun di tangan pihak ketiga penerima fasilitas, yang merupakan upaya terakhir PT. Adira Finance Kota Makassar untuk penyelamatan asset dalam upaya meminimalisasi kerugian, apabila customer tidak sanggup lagi melakukan pembayaran angsuran dengan melakukan penjualan barang jaminan, hasil dari penjualan tersebut untuk melunasi sisa hutang penerima fasilitas.
2. Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan Eksekusi obyek jaminan Fidusia Pada PT. Adira Finance Kota Makassar terhadap jaminan fidusia yang benda jaminannya tidak didaftarkan dan perjanjian jaminan fidusia dibuat dibawah tangan, apabila terjadi wanprestasi oleh (penerima fasilitas), maka (pemberi fasilitasnya) merupakan kreditor biasa yang tidak memiliki hak preferent, terhadap kreditor tersebut eksekusi jaminan fidusia untuk kepentingan piutangnya tidak dapat dilaksanakan. Sedangkan upaya penyelesaian yang

dilakukan oleh PT. Adira Finance Kota Makassar adalah meminta dan melibatkan penerima fasilitas (debitur) untuk menunjuk kemana barang jaminan dialihkan. Jika upaya ini tidak berhasil maka langkah yang diambil adalah melakukan pelaporan adanya tindak pidana pengelapan kepada kepolisian.

## **B. Saran**

Dari hasil kesimpulan di atas, maka ada beberapa saran penulis yang perlu disampaikan yaitu :

1. Meskipun menurut kenyataan bahwa tanpa adanya pendaftaran jaminan fidusia maka, eksekusi jaminan fidusia dapat berlangsung, namun demi untuk penyadaran di bidang hukum, aturan-aturan dalam Undang-undang Jaminan Fidusia nomor 42 tahun 1999 perlu mendapat penegasan dalam praktek, tetapi penegasan ini baru memiliki arti apabila ada sanksi yang jelas dan tegas.
2. Perlunya Departemen Hukum dan HAM, dalam hal ini Kantor Pendaftaran Fidusia untuk melakukan penyuluhan hukum pada lembaga-lembaga pembiayaan, menyangkut perjanjian fidusia, hal ini berkaitan dengan peningkatan sumber daya manusia pada lembaga pembiayaan, terutama terhadap keamanan inventasi, serta meningkatkan pendapatan negara dari biaya pendaftaran jaminan fidusia merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), yang sudah tentu akan memberikan pemasukan pada kas Negara. Apabila

tetap terjadi praktik yang demikian dari perusahaan-perusahaan pembiayaan, khususnya pembiayaan konsumen, maka pemasukan Negara dari PNBK akan berkurang.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku - buku :

- Abdulkadir Muhammad, 1981, *Hukum Perikatan*, Alumni : Bandung.
- Abdurrahman, 1999, *Ensiklopedi Ekonomi Keuangan Perdagangan*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Aten Affandi, Wahyu Affandi, 1983, *Tentang melaksanakan Putusan Hakim Perdata*, Alumni, Bandung.
- Bachtiar Sibarani, 2001, *Haircut atau Pareta Eksekusi*, Jurnal Hukum Bisnis.
- Djuhaendah Hasan, 1996, *Lembaga Jaminan Kebendaan Bagi Tanah dan Benda Liannya yang Melekat Pada Tanah Dalam Konsepsi Dalam Pemisahan Asas Horisonta*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2007, *Jaminan Fidusia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Hadi Sutrisno, 2000, *Metodologi Research Jilid 1*, Andi, Yogyakarta.
- Halle, 1983, *Credit Analysis A Complete Guide*, John Wiley and Sons Inc, New York.
- Hartono Hadi Suprpto, 1994, *Pokok-pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan*, Liberty : Yogyakarta.
- Henderson dan Maness , 1989, *The Financial Analysis Desk Book : A CashFlow Approach to Liquidity*, Van Nostrand Reinhold, New York.
- Ibrahim, 2004, *Cross Default Dan Cross Collateral Sebagai Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- J. Satrio, 1991, *Hukum Jaminan Hak-hak Kebendaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- , 1995, *Hukum Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Buku I, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Kasmir, 2001, *Bank dan Lembaga Keuangan lainnya*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Komaruddin, 2002, *Kamus Istilah Karya Tulis Ilmiah*, PT. Bumi Aksara, Jakarta.

- Marhainis Abdul Hay, 1975, *Hukum Perbankan Indonesia*, PT. Pradnya Paramita, Bandung.
- Mariam Darus Badruzaman, 1991, *Perjanjian Kredit Bank*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- , 1994, *Aneka Hukum Bisnis*, Cetakan I, Alumni : Bandung.
- , 1994, *Perjanjian Kredit Bank*, Alumni, Bandung.
- , 2001, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Cetakan I, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Munir Fuady, 2000, *Jaminan Fidusia*, PT. Citra aditya, Bandung.
- , 2002, *Hukum Tentang Pembiayaan (Dalam Teori dan Praktek)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- M. Djumhana, 2008, *Hukum Perbankan di Indonesia*, PT. Cita Aditya Bakti, Bandung.
- M. Yahya Harahap, 1998, *Ruang lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, PT. Gramedia, Jakarta.
- Oey Hoey Tiong,. 1984, *Fidusia sebagai Jaminan Unsur-unsur Perikatan*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Purwahid Patrik dan Kashadi, 2008, *Hukum Jaminan Edisi Revisi Dengan UUHT*, Uneversitas Diponegoro, semarang.
- Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, 1997, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, PT. Mandar Maju, Bandung.
- Ronny Hanitijo Sumitro, 1985, *Metode Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- , 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Yumetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- R.Soepomo, 1989, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta,
- Salim H.S., 2004, *Perkembangan Hukum Jaminan Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

- Simorangkir, *Seluk Beluk Bank Komersil*, 1988, PT. Aksara Persada Indonesia, Jakarta.
- Subekti, 1989, *Hukum Acara Perdata*, PT. Bina Cipta, Bandung.
- , 1991, *Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, PT. Cipta Aditya Bakti, Bandung.
- , 1996, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 1989, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 1999, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Edisi 4 Cetakan 2, Liberty : Yogyakarta.
- Sunaryo, 2009, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, PT. Sinar Grafika, Jakarta
- Sutan Remy Sjahdeini, 1995, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Institusi Bankir Indonesia, Jakarta.
- Sutrisno Hadi, 2001, *Metodologi Riset Nasional*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- , 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Thomas Suyatno, et al., 2003, *Dasar-dasar Perkreditan*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Wardoyo dan Hermansyah, 2006, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, PT. Kencana Prenada Media Group, Jakarta

## **B. Peraturan perundang-undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia.

## **C. Tesis, Majalah, Surat Kabar dan Situs Internet**

- Grace P. Nugroho, 2009, *Eksekusi Terhadap Objek Perjanjian Fidusia Dengan Akta Dibawah Tangan*, <http://www.hukumonline.com>.
- J. Satrio, *Beberapa Seki Hukum Standarisasi Perjanjian Kredit*, Seminar Masalah Standard Kontrak Dalam Perjanjian Kredit, Surabaya : 11 Desember 1993.
- Mochammad Dja'is, *Hukum Eksekusi Sebagai wacana baru dibidang hukum*, disampaikan dalam rangka Dies Natalis Ke-43, Fakultas Hukum, 2000 Undip.
- Purwahid Patrik, *Peranan Perjanjian Baku dalam Masyarakat*, Makalah dalam seminar Masalah Standard Kontrak Dalam perjanjian Kredit, Surabaya, 11 Desember 1993.
- Yunanto, 1998, *Kedudukan Fidusia Sebagai Lembaga Jaminan Setelah Berlakunya UUHT*, Tesis Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.